

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2016**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

ERLINDA SIAGIAN

14812147008

PRODI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018

PERSETUJUAN
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2016

SKRIPSI

Oleh:
ERLINDA SIAGIAN
14812147008

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 05 Januari 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Drs. Moh. Djazari, M.Pd
NIP. 19551215 197903 1 003

PENGESAHAN


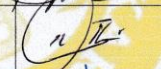
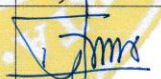
Skripsi yang berjudul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2016

Oleh:
ERLINDA SIAGIAN
14812147008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Februari 2018
dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dhyah Setyorini, S.E., M.Si., Ak.	Ketua Penguji		20/02. 2018
M. Djazari M.Pd.	Sekretaris		21/02 2018
Abdullah Taman, S.E., M.Si., Ak.	Penguji Utama		20/2018 02

Yogyakarta, 22 Februari 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M. Si
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlinda Siagian

NIM : 14812147008

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau di terbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 27 Desember 2017
Penulis ,



Erlinda Siagian
NIM. 14812147008

MOTTO

“Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.”

(Umar Bin Khattab)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(Aristoteles)

“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya”

(Kahlil Gibran)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”

(Muhammad Ali)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SwT., skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Roudah dan bapak Hadi Sumarno. Ibu dan bapak terhebat yang selalu memberi semangat, limpahan kasih sayang, dan motivasi tanpa henti.
2. Kedua kakakku, Andang Aprilianto dan Zul Imam Rochmanullah yang selalu mendoakan dan mendukung.
3. Bapak M. Djazari selaku Dosen pembimbing, terimakasih telah memberikan bimbingan, pengarahan dan meluangkan waktu untuk membimbing.
4. Sahabat dan teman-teman tersayang yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM
(DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

Oleh:

ERLINDA SIAGIAN
14812147008

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta. 2) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta 3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta. 4) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.

Desain penelitian ini data korelasional yang bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan angka koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,852; koefisien determinasi (r^2_{x1y}) 0,726; t_{hitung} 9,362 > t_{tabel} 1,69552. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x2y}) 0,381; koefisien determinasi (r^2_{x2y}) 0,145; t_{hitung} 2,346 > t_{tabel} 1,69552. 3) Terdapat pengaruh positif tidak signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x3y}) 0,015; koefisien determinasi (r^2_{x3y}) 0,000225; t_{hitung} 0,088 < t_{tabel} 1,69552. 4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,868; koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) 0,754; F_{hitung} 31,628 > F_{tabel} 2,91.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE (PAD), GENERAL ALLOCATION FUND (DAU), SPECIAL ALLOCATION FUND (DAK) ON ECONOMIC GROWTH IN THE PROVINCE OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION THE PERIODE FROM 2010-2016

By:

ERLINDA SIAGIAN
14812147008

ABSTRACT

This study was conducted to determine: 1) The influence of Local Revenue (PAD) on Economic Growth in the Province of Yogyakarta Special Region. 2) Influence of General Allocation Fund (DAU) on Economic Growth in the Province of Yogyakarta Special region. 3) Influence of Special Allocation Fund (DAK) on Economic Growth in the Province of Yogyakarta Special Region. 4) Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) simultaneously on Economic Growth in the Province of Yogyakarta Special Region 2010-2016.

The research design is a quantitative correlation. Population in this research is local government of district/municipality in Province of Yogyakarta Special Region of the 2010-2016. Data collection techniques using the documentation method. Data analysis prerequisite test using the normality test, multicollinearity test, heteroskedasticity test, and autocorrelation test. Hypothesis test using simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis.

Result of research indicate that: 1) There is positive and significant influence of Local Revenue (PAD) to Economic Growth, with correlation coefficient (r_{x1y}) 0,852; coefficient of determination (r^2_{x1y}) 0.726; t_{count} 9,362 > t_{table} 1.69552. 2) There is a positive and significant influence of General Allocation Fund (DAU) on Economic Growth indicated by the correlation coefficient (r_{x2y}) 0.381; coefficient of determination (r^2_{x2y}) 0.145; t_{count} 2.346 > t_{table} 1.69552. 3) There is an insignificant positive influence of the Special Allocation Fund (DAK) on Economic Growth indicated by the correlation coefficient number (r_{x3y}) 0.015; coefficient of determination (r^2_{x3y}) 0.000225; t_{count} 0.088 < t_{table} 1.69552. 4) There is a positive and significant influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) simultaneously on Economic Growth indicated by the correlation coefficient ($R_{y(1,2,3)}$) for 0.868; coefficient of determination ($R^2_{y(1,2,3)}$) 0,754; F_{count} 31.628 > F_{table} 2,91.

Keywords: Economic Growth, Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SwT., atas segala limpah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

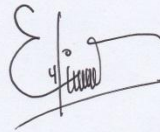
1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si. Dekan FE UNY yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Moh. Djazari, M.Pd. Dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Abdullah Taman M.Si., Ak. Narasumber yang selalu bersedia memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh jajaran dosen jurusan Pendidikan Akuntansi.
6. Bapak, ibu, dan kedua kakakku tercinta yang senantiasa sabar memberikan dukungan moral dan material dalam penulisan skripsi ini.

7. Pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungannya kepada penulis baik secara material maupun spiritual, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 27 Desember 2017

Penulis



Erlinda Siagian

NIM. 14812147008

x

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Deskripsi Teori.....	11
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	11
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	11
b. Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi.....	12
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	15
d. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi	18
2. Pendapatan Asli Daerah	21
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	21
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	22

c. Fungsi Pendapatan Asli Daerah	30
3. Dana Alokasi Umum.....	30
a. Pengertian Dana Alokasi Umum	30
b. Peran Dana Alokasi Umum	32
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum	32
d. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum	33
4. Dana Alokasi Khusus.....	33
a. Pengertian Dana Alokasi Khusus.....	33
b. Peran Dana Alokasi Khusus.....	34
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus	35
d. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Khusus	35
B. Penelitian yang Relevan.....	36
C. Kerangka Berpikir.....	39
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi .	39
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	41
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	41
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi	42
D. Paradigma Penelitian	45
E. Hipotesis Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Desain Penelitian	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47
C. Populasi.....	47
D. Definisi Operasional Variabel.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	51
1. Uji Asumsi Klasik.....	51
a. Uji Normalitas.....	51
b. Uji Multikolinieritas.....	52
c. Uji Autokorelasi.....	52
d. Uji Heteroskedastisitas.....	53
2. Uji Hipotesis	53
a. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	53
b. Analisis Regresi Linier Berganda	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Data Umum	61
2. Data Khusus	62
3. Analisis Data	64
a. Uji Asumsi Klasik.....	64
1) Uji Normalitas Data	64
2) Uji Multikolinieritas.....	68
3) Uji Autokorelasi.....	69

4) Uji Heteroskedastisitas.....	71
b. Uji Hipotesis	72
1) Analisis Regresi Linier Sederhana.....	72
2) Analisis Regresi Linier Berganda	79
B. Pembahasan	82
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi	82
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi	84
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi	85
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi	88
C. Keterbatasan Penelitian.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rangkuman Data Khusus.....	63
2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	67
3. Hasil Uji Multikolinieritas dengan Matriks Korelasi.....	68
4. Hasil Uji Autokorelasi	70
5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah	73
6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Umum.....	75
7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Khusus.....	77
8. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda	79
9. Rangkuman Sumbangan Relatif dan Efektif.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian	45
2. Grafik Histogram Normalitas	65
3. Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot	66
4. Diagram Heteroskedastisitas.....	71
5. Ringkasan Hasil Penelitian	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabel Data Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.....	97
2. Tabel Data PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016.....	99
3. Tabel Data Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/kota Tahun 2010-2016	103
4. Tabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK tahun 2010-2016.....	139
5. Laporan Data Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010-2016	148
6. Laporan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010-2016	150
7. Laporan Data Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2010-2016	159
8. Laporan Data Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010-2016	161
9. Hasil Uji Asumsi Klasik	163
10. Hasil Analisis Regresi Linier	168
11. Hasil Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif.....	172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi *output* totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi. Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri (Boediono, 1985:1).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kemajuan perekonomian di dalam suatu daerah dengan ditunjukkan oleh perubahan *output*. Menurut Susanti (2000) Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk

mengukur Pertumbuhan Ekonomi di tingkat nasional adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, sedangkan menurut Djoyohadikusumo (1994: 1) meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto per kapitanya. Indikator lain yang digunakan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perubahan pendapatan riil dalam jangka waktu panjang, nilai kesejahteraan penduduk, tenaga kerja dan pengangguran.

Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Menurut Bastian (2006: 338) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, kerana program otonomi daerah adalah mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab

pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2006: 354).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu substansi yang termuat di dalam otonomi daerah adalah desentralisasi yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU no 32 tahun 2004). Pembiayaan untuk Pertumbuhan Ekonomi sendiri berdasarkan asas desentralisasi (Bastian, 2006: 331).

Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah memiliki wewenang untuk menggali hasil pendapatan daerah dan melakukan alokasi mandiri untuk memprioritaskan dalam hal pembangunan, dengan harapan dapat pemeratakan pembangunan di segala wilayah dengan potensi masing-masing sesuai keinginan daerah. Menurut Bastian (2006: 332) di dalam azas desentralisasi, seiring dengan diserahkannya kewenangan ke daerah, pemerintah pusat harus menyerahkan pembiayaan, personalia, dan

perlengkapan (3P) sebagai syarat mutlak. Desentralisasi selalu dimaknai sebagai distribusi sumber daya dari pusat ke daerah.

Desentralisasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan oleh UU No. 33 Tahun 2004. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan PAD, DAU dan DAK selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan PAD, DAU dan DAK tersebut harus berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, namun daerah tidak akan berhasil, bila daerah tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD, DAU dan DAK. Keberhasilan peningkatan PAD, DAU dan DAK hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi yang baik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2004), secara umum sumber-sumber utama bagi Pertumbuhan Ekonomi adalah adanya investasi. Investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau

sumber daya manusia dan fisik yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Investasi memicu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal.

Menurut Ariefiantoro dan Saddewisasi (2011), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi. Faktor lain menurut Supartoyo, Tatum dan Sendouw (2013) antara lain laju pertumbuhan angkatan kerja, karena termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Laju pertumbuhan ekspor netto juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi walaupun belum besar peranannya, sedangkan faktor lain yaitu pengeluaran pemerintah, terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah misalnya untuk penyediaan atau perbaikan infrastruktur maka proses produksi barang dan jasa akan semakin lancar. Pengeluaran pemerintah akan memicu bertambahnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus karena kenaikan pengeluaran pemerintah mengindikasikan kenaikan jumlah anggaran daerah.

Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman) dan 1 kota madya (Kota Yogyakarta) yang juga ikut serta dalam desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia,

sehingga setiap daerahnya berhak menentukan kondisi daerah termasuk Pertumbuhan Ekonominya. Berdasarkan data dari perwakilan Bank Indonesia D.I Yogyakarta, diketahui bahwa provinsi D.I Yogyakarta memiliki rata-rata Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,05% pada tahun 2016 dan ini lebih besar dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,95%, namun itu bukan merupakan Pertumbuhan Ekonomi yang tertinggi, pada tahun 2013 Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta adalah yang paling tinggi dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu mencapai 5,49%. Struktur perekonomian provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2016 didominasi oleh besarnya kontribusi sektor hotel dan restoran, industri pengolahan, serta konstruksi dan real estate. Data dari perwakilan Bank Indonesia D.I Yogyakarta tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki sifat yang dinamis atau fluktuatif, itu terlihat dari naik dan turunnya rata-rata Pertumbuhan Ekonomi di D.I Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2004), Ariefiantoro dan Saddewesisasi (2011), dan Supartoyo, Tatuh dan Sendouw (2013) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dan ekspor.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh PAD, DAU dan DAK secara individu maupun bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Daerah tidak bisa dikatakan berhasil bila daerah tersebut tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD, DAU dan DAK.
2. Investasi belum dilakukan secara maksimal.
3. Pengeluaran pemerintah daya serapnya masih rendah.
4. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tingkat pendidikan masih rendah.
5. Pertumbuhan angkatan kerja yang masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, peneliti membatasi masalah pada:

1. Pembatasan aspek pada penelitian ini hanya terhadap laporan PDRB, yang berkaitan dengan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah investasi, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dan ekspor.
3. Pengukuran atau penghitungan Pertumbuhan Ekonomi menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.
4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan yang berhubungan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta.

- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembangunan yang ada di daerah, sehingga masyarakat bias ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1985) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* perkapita, disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi *output* totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Kemudian aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi. Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri. Sejalan dengan Boediono (1985), Sadono Sukirno (2014) menyebutkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Todaro (2004) Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, pengertian Pertumbuhan Ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka waktu tertentu yang kemudian menaikkan kapasitas suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan Ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah sebagai alat ukur. Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi memiliki sifat dinamis, yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Pertumbuhan Ekonomi tumbuh dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan bahkan puluhan tahun.

b. Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa Pertumbuhan Ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dibawah ini terdapat beberapa penjelasan mengenai Pertumbuhan Ekonomi:

1) Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat dapat dikatakan semakin sejahtera jika setidaknya output perkapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Makin tinggi PDB perkapita maka perekonomianpun terus bertumbuh dan peningkatan PDB perkapita tersebut harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jika pertambahan penduduk suatu negara adalah 2%, maka pertumbuhan PDB harus lebih tinggi dari 2%.

2) Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Mengingat manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi maka dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat bila *output* meningkat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu pabrik, pihak pabrik tentu harus menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga apabila jumlah *output* meningkat, itu mengindikasikan adanya peningkatan kesempatan kerja.

3) Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tanpa adanya Pertumbuhan Ekonomi maka yang terjadi bukanlah pemerataan pendapatan tetapi justru pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas. Semakin luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya produktifitas maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.

4) Persiapan bagi Tahapan Kemajuan Berikutnya

Suatu perekonomian dalam sebuah negara dapat diibaratkan sebagai seorang manusia. Manusia tidak dapat menjadi besar dan dewasa dalam tempo yang sebentar, begitu pula dengan perekonomian suatu negara, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mendewasakan sebuah perekonomian jauh lebih lama bila dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia untuk menjadi dewasa. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan mereka membutuhkan waktu sekitar tiga sampai lima abad untuk memodernisasi perekonomiannya.

Kenyataan di atas mengisaratkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebab sebuah perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang, umumnya telah

memiliki kemampuan untuk menjadi modern. Untuk menunjang Pertumbuhan Ekonomi jangka panjang yang dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku dan teknologi melainkan juga terdapat kelembagaan-kelembagaan ekonomi sosial modern.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi yang baik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2004), secara umum sumber-sumber utama bagi Pertumbuhan Ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Menurut Sadono Sukirno (2000) pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN atau APBD. Dalam mengambil keputusan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut.

Besarnya penerimaan/pendapatan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pendanaan pengeluaran pemerintah sendiri berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah. Beberapa pos tersebut (PAD, DAU dan DAK) dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam waktu tertentu. Tujuan dari

kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Ariefiantoro dan Saddewisasi (2011), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan penduduk karena penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supartoyo, Tatum, dan Sendouw (2013), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Ekspor juga dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, karena apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena ekspor yang meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari permintaan barang luar negeri di dalam negeri.

Dari beberapa pendapat para peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di antaranya investasi pemerintah, pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, ekspor dan desentralisasi. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran melalui Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Cara mengukur terjadinya Pertumbuhan Ekonomi di suatu negara adalah dengan cara menghitung Produk Domestik Bruto (PDB). Di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar (Supartoyo dan Tatu, 2013: 6).

Menurut Imamul Arifin (2007) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (region), baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara garis besar ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1) Metode langsung, dapat digunakan tiga macam pendekatan sebagai berikut:

a) Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, sedangkan Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/output) dari barang dan jasa

tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

b) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung.

c) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor neto, di dalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa diproduksi.

2) Metode Alokasi (Metode Tidak Langsung)

a) Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga di tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB/*output*) dengan biaya masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor.

b) Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan penghitungan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan atau sektoral dan untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Mardiasmo (2007), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya

pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2007: 32) “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil

pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”. Berdasarkan referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a) Jenis Pajak Provinsi:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Air Permukaan;
- (5) Pajak Rokok.

b) Jenis Pajak Kabupaten:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Parkir;

- (8) Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Mardiasmo (2007) mengungkapkan bahwa “untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah”. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang sebenarnya dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat diketahui peningkatan kapasitas pajak (*tax capacity*) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2) Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati

jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah.
- b) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

- a) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
 - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - (10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 - (11) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - (12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - (13) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
 - (14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan
- (4) Retribusi Terminal

- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - (6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
 - (7) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - (8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - (10) Retribusi Penyeberangan Air
 - (11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- (3) Retribusi Izin Gangguan
- (4) Retribusi Izin Trayek
- (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Pendapatan lain-lain yang disahkan

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi

untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

c. Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk

belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Peran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan. Tingginya transfer dari pusat ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sangat penting dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan kepada publik.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah.
2. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
3. Luas wilayah daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun.

5. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

d. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan bersih dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud dalam poin 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
- 4) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam APBN.

4. Dana Alokasi Khusus

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Abdul Halim (2007) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang didistribusikan oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan dari APBN.

b. Peran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk:

1. Untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Untuk membantu daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum.
3. Untuk kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Masih banyaknya daerah tertinggal

Dimana daerah tersebut kurang mampu dalam membiayai seluruh pengeluarannya. DAK berperan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.

2. Pembangunan yang tidak merata

Dimana DAK menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.

3. Masih banyaknya pengangguran

DAK dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produktifitas perluasan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur sehingga akan mengurangi pengangguran.

d. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK

2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
3. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Wulan Fauzyny (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011. Dalam penelitian ini Wulan Fauzini menggunakan 3 variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Pajak/Bukan Pajak, serta menggunakan 1 variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap PDRB, tetapi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berpengaruh negatif terhadap PRDB. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian dari Wulan Fauzini (2013) yaitu menggunakan variabel bebasnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak. Persamaan penelitian yang di buat penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Fauzini (2013) yaitu variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Penelitian Febrian Dwi Prakarsa (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012. Dalam penelitian ini Febrian Dwi Prakarsa menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel Belanja Barang dan Jasa berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Perbedaan penelitian penulis

dengan penelitian dari Febrian Dwi Prakarsa (2014) yaitu menggunakan variabel bebasnya Pengeluaran Pemerintah. Persamaan penelitian yang di buat penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrian Dwi Prakarsa (2014) yaitu variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Penelitian Zuwesty Eka Putri (2015) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini Zuwesty Eka Putri menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian dari Zuwesty Eka Putri (2015) yaitu menggunakan variabel bebasnya Invlasi. Persamaan penelitian yang di buat penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuwesty Eka Putri (2015) yaitu variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
4. Penelitian Annora Azzahra (2015) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2012. Dalam penelitian ini Annora Azzahra menggunakan 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian dari Annora Azzahra (2015) yaitu tidak ada. Persamaan penelitian yang di buat penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Annora Azzahra (2015) yaitu variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tingginya angka Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan. Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa Pertumbuhan Ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut

pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat PDRB yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan Pertumbuhan Ekonomi di daerah. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan PAD yang berkelanjutan tersebut akan menyebabkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Peningkatan PAD pada suatu daerah harus berdampak pada perekonomian daerah tersebut. Karena suatu daerah tidak bisa dikatakan berhasil apabila daerah tersebut tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD. Apabila yang terjadi malah sebaliknya maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima saja, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur dan meningkatkan perekonomian serta memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataanya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula.

Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus. DAK adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju Pertumbuhan Ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan, pengadaan, peningkatan, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah dengan umur ekonomis panjang, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Pengalokasian DAK kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat berdasarkan kriteria tertentu, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan pembangunan yang akan mendorong aktifitas perekonomian dan percepatan pembangunan yang kemudian meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dapat merangsang peningkatan disektor-sektor lain seperti; peningkatan kesejahteraan

masyarakat, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan rakyat. Untuk dapat benar-benar mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus menggunakan dana pengeluaran pemerintah dengan efektif dan efisien. Dana pengeluaran pemerintah daerah bersumber dari APBD, pemerintah dapat menggunakan beberapa pos yang terdapat dalam APBD guna memaksimalkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah tersebut akan meningkatkan pelayanan publik yang kemudian dapat merangsang tingkat aktifitas perekonomian. Beberapa pos tersebut diantaranya adalah PAD, DAU dan DAK.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi, daerah semakin bisa memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

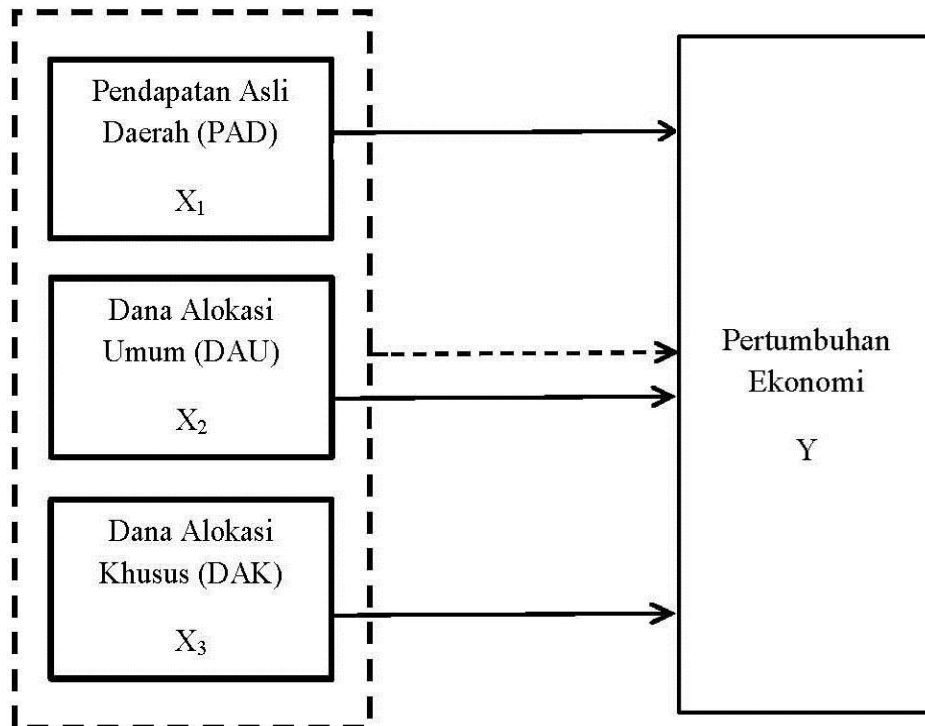
Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer yang signifikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik agar Pertumbuhan Ekonomi dapat terjadi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju Pertumbuhan Ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang.

Berdasarkan pendapat dari masing-masing variabel bebas yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X_1 = Variabel Independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Variabel Independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Variabel Independen 3, Dana Alokasi Khusus (DAK)

Y = Variabel Dependen, Pertumbuhan Ekonomi

—————> = Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individual terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I.Yogyakarta.

- - - ➔ = Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.
2. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.
3. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.
4. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang digunakan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas yang terdiri atas X_1 , X_2 , X_3 terhadap Y bersifat kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang disajikan berupa angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017.

C. Populasi

Menurut Sugiyono (2010: 115) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016.

D. Definisi Operasional Variabel

Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yang kemudian menaikkan kapasitas suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan Ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan untuk skala regional atau daerah disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah, ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Tujuan dari PDB dan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}) / (\text{PDRB}_{t-1}) \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto tahun sekarang

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

(Purwanto Fiona, 2013: 38)

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah/PAD (X_1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber asli dari daerah itu sendiri dan diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD didapatkan dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan:

$$\mathbf{PAD = HPD + RD + PLPD + LPS}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

(Purwanto Fiona, 2013: 38)

b. Dana Alokasi Umum/DAU (X_2)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada

masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal

(Purwanto Fiona, 2013: 38)

c. Dana Alokasi Khusus/DAK (X_3)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju Pertumbuhan Ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sugiyono (2010: 422), bentuk dari teknik dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, misalnya tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2010-2016.

F. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga dan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis keempat. Analisis data sekunder dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji Multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Tahap kedua, melakukan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi dan variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov Test dengan membandingkan *asymptotic signyfycance* dengan $\alpha = 0,05$. Dasar

penarikan kesimpulan uji normalitas ini adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic signifcacency* $> 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Bhuono Agung (2005: 58), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70, maka model dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series* dengan $n -$ sampel dalam suatu periode tertentu. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin-Watson* (*DW test*) (Imam Ghozali, 2011).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a) Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.

- b) Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* (dl) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
- c) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.
- d) Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

d. Uji Heterokedastisitas

“Uji heterokedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi-observasi lainnya” (Imam Ghozali, 2011: 139). Uji heterokedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot (*scatterplot*) dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu, serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini didasarkan pada hubungan ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiono, 2010: 270).

1) Rumus persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
X = Variabel Bebas Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK)
 α = konstanta
b = koefisien regresi

harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah subjek.
 $\sum X_i Y_i$ = Jumlah perkalian antara X dan Y.
 $\sum X_i$ = Jumlah skor X
 $\sum Y_i$ = Jumlah skor Y

(Sugiyono. 2010: 272)

2) Mencari koefisien korelasi sederhana (r) antara X_1 , X_2 , X_3 terhadap Y.

Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah bernilai positif atau negatif. Korelasi sederhana dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = Koefisien korelasi antara X_1 , X_2 dan X_3 dengan Y
- $\sum X_i$ = Total jumlah dari variabel X
- $\sum Y_i$ = Total jumlah variabel Y
- $\sum xy$ = Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan Y
- $\sum x^2$ = Jumlah kuadrat nilai X
- $\sum y^2$ = Jumlah Kuadrat nilai Y

(Sutrisno Hadi, 2004:4)

- 3) Mencari Koefisien Determinan (r^2) antara Prediktor X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y dengan rumus sebagai berikut:

$$r^2_{(x_1y)} = \frac{a_1 \sum X_1 Y}{\sum Y^2}$$

$$r^2_{(x_2y)} = \frac{a_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

$$r^2_{(x_3y)} = \frac{a_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

- $r^2_{(x_1y)}$ = Koefisien determinasi antara X_1 dengan Y.
- $r^2_{(x_2y)}$ = Koefisien determinasi antara X_2 dengan Y.
- $r^2_{(x_3y)}$ = Koefisien determinasi antara X_3 dengan Y.
- a_1 = Koefisien prediktor X_1 .
- a_2 = Koefisien prediktor X_2 .
- a_3 = Koefisien prediktor X_3 .
- $\sum X_1 Y$ = Jumlah produk X_1 dengan Y.
- $\sum X_2 Y$ = Jumlah produk X_2 dengan Y.
- $\sum X_3 Y$ = Jumlah produk X_3 dengan Y.
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat kriterium Y

(Sutrisno Hadi, 2004: 22)

4) Menguji Signifikan dengan Uji t.

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi digunakan Uji t (*t-test*). Signifikansi dengan uji t dapat dihitung dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t_{hitung}
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel

(Sugiyono. 2010: 250)

Hasil t_{hitung} selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} tarif signifikansi 5%. Jika t_{hitung} sama dengan atau lebih besar dari t_{tabel} maka pengaruh variabel bebas (prediktor) terhadap variabel terikat (kriterium) signifikan. Sebaliknya, jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka pengaruh variabel bebas (prediktor) terhadap variabel terikat (kriterium) tidak signifikan.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, serta data telah terdistribusi normal, maka data

yang dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan berikut:

- 1) Membuat persamaan garis regresi tiga prediktor dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + K$$

Keterangan:

- Y = Kriteria (Pertumbuhan Ekonomi)
- X₁ = Prediktor 1 (Pendapatan Asli Daerah)
- X₂ = Prediktor 2 (Dana Alokasi Umum)
- X₃ = Prediktor 3 (Dana Alokasi Khusus)
- α₁ = Bilangan koefisien prediktor X₁
- α₂ = Bilangan koefisien prediktor X₂
- α₃ = Bilangan koefisien prediktor X₃
- K = Bilangan konstanta

(Sutrisno Hadi, 2004: 18).

- 2) Mencari koefisien korelasi antara prediktor X₁, X₂ dan X₃ terhadap koefisien Y.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, apakah mempunyai pengaruh positif atau pengaruh negatif. Dikatakan memiliki pengaruh positif jika koefisien korelasi bernilai positif dan dikatakan memiliki pengaruh negatif jika koefisien korelasi bernilai negatif.

Menurut Sutrisno Hadi (2004: 22) koefisien korelasi dihitung dengan rumus:

$$R_{y(1,2,3)} = \frac{\sqrt{a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 + a_3 \sum X_3 Y}}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

- $R_{y(1,2,3)}$ = Koefisien korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pertumbuhan Ekonomi
- α_1 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- α_2 = Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU)
- α_3 = Koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK)
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat Pertumbuhan Ekonomi
- $\sum X_1 Y$ = Jumlah produk antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi.
- $\sum X_2 Y$ = Jumlah produk antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi
- $\sum X_3 Y$ = Jumlah produk antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi
- (Sutrisno Hadi, 2004: 22)

- 3) Mencari koefisien determinasi antara prediktor X_1 , X_2 dan X_3

terhadap koefisien Y, dihitung dengan rumus:

$$R^2 Y_{(1,2,3)} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

- $R^2 Y_{(1,2,3)}$ = Koefisien determinasi antara X_1 , X_2 , dan X_3 dengan Y
- b_1 = Koefisien prediktor X_1
- b_2 = Koefisien prediktor X_2
- b_3 = Koefisien prediktor X_3
- $\sum X_1 Y$ = Jumlah produk antara X_1 dengan Y
- $\sum X_2 Y$ = Jumlah produk antara X_2 dengan Y
- $\sum X_3 Y$ = Jumlah produk antara X_3 dengan Y
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat kriterium Y

- 4) Menguji keberartian regresi ganda, dengan menggunakan rumus:

$$F_{reg} = \frac{R(N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Keterangan:

F_{reg} = Harga F garis regresi
 N = Cacah kasus
 M = Cacah prediktor
 R^2 = Koefisien determinan antara kriterium dengan prediktor

(Sutrisno Hadi, 2004: 23)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila F_{hitung} sama dengan atau lebih besar dari F_{tabel} pada tarif signifikansi 5%, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.

5) Mencari sumbangan dari setiap variabel prediktor terhadap variabel kriterium dengan rumus:

a) Mencari Sumbangan Relatif (SR%)

Sumbangan Relatif (SR) adalah persentase kontribusi relativitas yang diberikan variabel bebas kepada variabel terikat. Rumus yang digunakan untuk mencari besarnya sumbangan relatif adalah sebagai berikut:

$$SR\% = \frac{\alpha \sum XY}{JK_{reg}} \times 100\%$$

Keterangan:

SR% = Sumbangan relatif dari suatu prediktor
 α = Koefisien prediktor
 $\sum xy$ = Jumlah produk antara X dan Y

JK_{reg} = Jumlah kuadrat regresi

(Sutrisno Hadi, 2004: 39)

b) Mencari Sumbangan Efektif (SE%)

Sumbangan efektif adalah persentase perbandingan efektivitas yang diberikan satu variabel bebas kepada satu variabel terikat dengan variabel-variabel bebas lain baik yang diteliti maupun tidak. Rumus yang digunakan untuk mencari besarnya sumbangan efektif adalah sebagai berikut:

$$SE\% = SR\% \times R^2$$

Keterangan:

SE% = Sumbangan efektif dari suatu prediktor
SR% = Sumbangan relative dari suatu prediktor
 R^2 = Koefisien determinasi

(Sutrisno Hadi, 2004: 39)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta berjumlah 4 Kabupaten dan 1 Kota. Provinsi D.I. Yogyakarta berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten dan Kota di D.I. Yogyakarta yang menjadi populasi dari penelitian adalah 4 Kabupaten dan 1 Kota, sebagai berikut:

1. Kab. Kulon Progo
2. Kab. Bantul
3. Kab. Gunungkidul
4. Kab. Sleman
5. Kota Yogyakarta

Data pada penelitian ini (N) sebanyak 35, data didapatkan dari laporan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) dan laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016 dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Setelah dilakukan seleksi data, maka dapat diketahui terdapat data *outliers* pada penelitian ini. Data *outliers* adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data, data *outliers* yang memiliki

karakteristik unik dihilangkan agar tidak mengganggu pengujian dalam penelitian ini.

2. Data Khusus

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 2010-2016, maka diperoleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan data Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), terlampir di halaman 98.

Terdapat empat data dalam penelitian ini yaitu data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai minimal, maksimal, *mean*, dan standar deviasi.

Data khusus mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016, maka nilai minimum, maksimal, *mean* dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rangkuman Data Khusus

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PE	35	3.06	5.89	4.9600	0.53940
PAD	35	42542031.00	717151176.00	259276708.6286	185815206.59631
DAU	35	395444062.00	1014310630.00	705291106.6857	183877144.42067
DAK	35	1761900.00	292199996.00	72663295.2571	71055001.05966
Valid N (listwise)	35				

Sumber: output SPSS 20.0, data sekunder yang diolah, 2017

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data penelitian yang ada, data dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS Staistik 20.0 *for windows*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu berjumlah 35. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai nilai minimum sebesar 3,06 dan nilai maksimal sebesar 5,89. Nilai mean 4,9600 dan nilai standar deviasi 0,53940.

b. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data penelitian yang ada, data dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS Statistik 20.0 *for windows*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 35. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 42.542.031.000 dan nilai maksimum sebesar Rp. 717.151.176.000. Nilai *mean* 259276708,6286, dan nilai standar deviasi 185815206,59631.

c. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan data penelitian yang ada, data dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS Statistik 20.0 *for windows*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 35. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 395.444.062.000 dan nilai maksimum sebesar Rp. 1.014.310.630.000. Nilai *mean* 705291106,6857, dan nilai standar deviasi 183877144,42067.

d. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan data penelitian yang ada, data dianalisis dengan bantuan komputer dengan program SPSS Statistik 20.0 *for windows*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 35. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 1.761.900.000 dan nilai maksimum sebesar Rp. 292.199.996.000. Nilai *mean* 72663295,2571, dan nilai standar deviasi 71055001,05966.

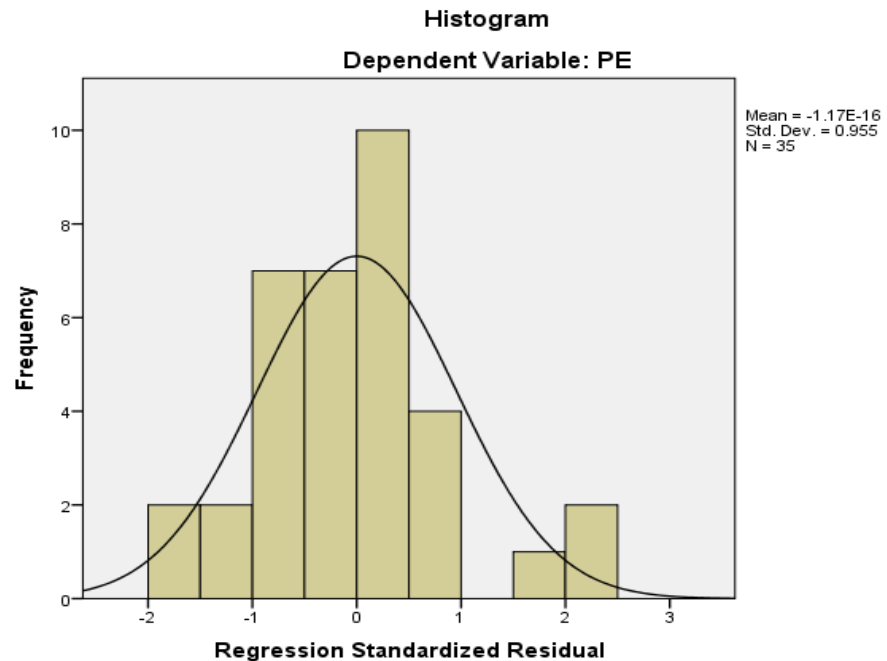
3. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Data

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Dari hasil pengumpulan data sekunder untuk

dilakukan uji normalitas dapat diperoleh grafik histogram sebagai berikut:

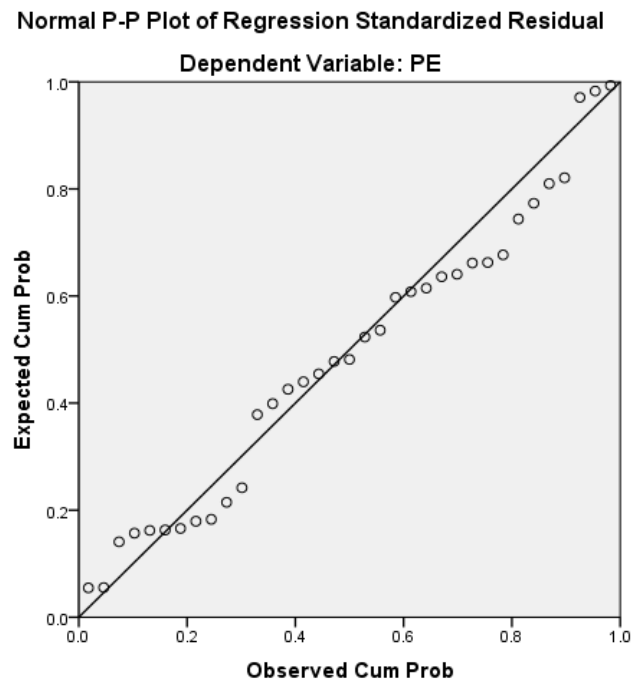


Gambar 2. Grafik Histogram Normalitas

Sumber: output SPSS 20.0, data sekunder yang diolah, 2017

Dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal untuk melihat normalitas data adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis diagonal dan plotting data residual akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas dengan Normal *P-Plot*

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder yang diolah, 2017

Pada grafik normal probability plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu

dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sampel test Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi akan dipakai lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal	Mean	0,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	36313359.71647036
Most Extreme	Absolute	0,115
Differences	Positive	0,115
	Negative	-0,073
Kolmogorov-Smirnov Z		0,683
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,739

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Output SPSS 20.0, data sekunder diolah, 2017*

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,683 dengan probabilitas signifikansi 0,739 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ hal ini berarti data terdistribusi secara normal, hasilnya konsisten

dengan uji grafik yang dilakukan sebelumnya, sehingga model regresi ini memenuhi uji normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Bhuono Agung (2005: 58), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70, maka model dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Adapun hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas dengan Matriks Korelasi

Coefficient Correlations^a

Model		DAK	PAD	DAU
1	Correlations	1.000	0,135	-0,512
	DAK			
	PAD	0,135	1.000	-0,547
	DAU	-0,512	-0,547	1.000
	Covariances	0,012	0,001	-0,003
	DAK			
	PAD	0,001	0,002	-0,001
	DAU	-0,003	-0,001	0,002

a. Dependent Variable: PE

Sumber: *Output* SPSS 20.0, data sekunder diolah, 2017

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat korelasi sebesar -0,547 atau sekitar 54,7%. Karena korelasi ini masih di bawah 0,70, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series* dengan n – sampel dalam suatu periode tertentu. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin-Watson (DW test)* (Imam Ghazali, 2011).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a) Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan ($4-du$) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.

- b) Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* (dl) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
- c) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.
- d) Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,868 ^a	0,754	0,730	38029887.73385	1,397

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

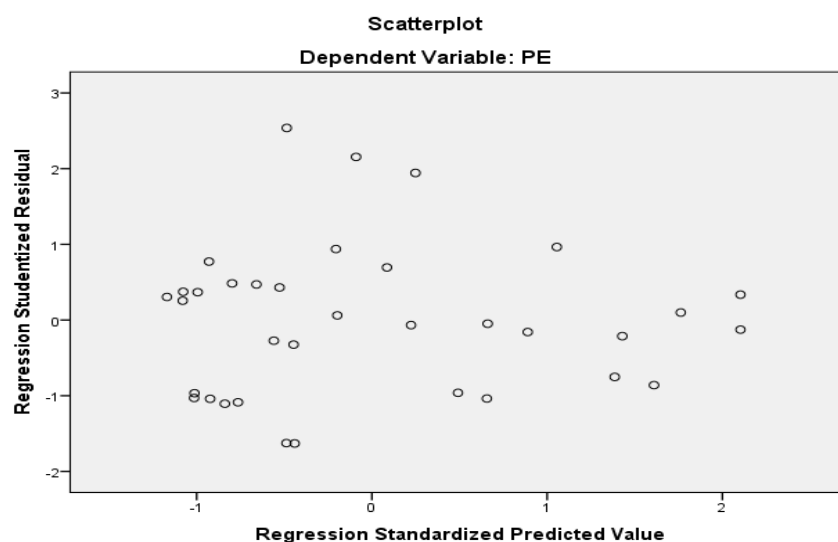
b. Dependent Variable: PE

Sumber: *Output* SPSS 20.0, data sekunder diolah, 2017

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 35 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka dari tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai sebesar 1,397. Karena nilai Durbin Watson lebih besar dari batas atas (dU) dan kurang dari (4-dU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

4) Uji Heterokedastisitas

“Uji heterokedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi-observasi lainnya” (Imam Ghozali, 2011: 139). Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot (*scatterplot*) dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu, serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 4. Diagram Heteroskedastisitas

Sumber: *Output* SPSS 20.0, data sekunder diolah, 2017

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized* (Imam Ghozali, 2011).

Dari gambar 4 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

b. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini didasarkan pada hubungan ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiono, 2010: 270).

a) Persamaan regresi linier sederhana

-) Uji Hipotesis Pertama

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) *for windows* 20 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel	Koefisien Regresi (<i>Beta</i>)	r_{x1y}	r^2_{x1y}	Sig	t_{hitung}	t_{tabel}	Keterangan
Konstanta	64669826,144			0,000	5,682	1,69552	
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	0,336	0,852	0,726	0,000	9,362		Positif

Sumber: *Output* SPSS 20.0, data sekunder diolah, 2017

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 11 di atas dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 64669826,1 + 0,336PAD$$

Nilai konstanta sebesar 64669826,1, hal ini berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar 64669826,1 jika Pendapatan Asli Daerah sama dengan nol. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bertambah 0,336 menunjukkan bahwa

apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 1 persen maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,336 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_1y}) sebesar 0,852. Koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) sebesar 0,726 yang berarti 72,6% variasi pada variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini jauh lebih rendah dari 0,05 dan nilai t_{hitung} 9,362 > t_{tabel} 1,69552 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Hasil uji ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis pertama menyatakan “terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dapat diterima.

-) Uji Hipotesis Kedua

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) *for windows* 20.0 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Variabel	Koefisien Regresi (<i>Beta</i>)	r_{x2y}	r^2_{x2y}	Sig	t_{hitung}	t_{tabel}	Keterangan
Konstanta	44871901,878			0,000	0,962	1,69552	
Dana Alokasi Umum (X_2)	0,151	0,381	0,145	0,024	2,346		Positif

Sumber: *Output* SPSS 20.0, data sekunder diolah, 2017

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 12 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 44871901,878 + 0,151DAU$$

Nilai konstanta sebesar 44871901,878, hal ini berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar 44871901,878 jika Dana Alokasi Umum sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,151, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0,151 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Dana Alokasi Umum (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_2y}) sebesar 0,381. Koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,145 yang berarti 14,5% variasi pada variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya 85,5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai signifikansi sebesar 0,024, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai t_{hitung} 2,346 > t_{tabel} 1,69552 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan “terdapat

pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dapat diterima.

-) Uji Hipotesis Ketiga

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) for windows 20.0 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Variabel	Koefisien Regresi (Beta)	r_{x3y}	r^2_{x3y}	Sig	t_{hitung}	t_{tabel}	Keterangan
Konstanta	150546460,758			0,000	8,322	1,69552	
Dana Alokasi Khusus (X_3)	0,016	0,015	0,000225	0,930	0,088		Positif

Sumber: *Output* SPSS 20.0, data sekunder diolah, 2017

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 8 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 150546460,758 + 0,016DAK$$

Nilai konstanta sebesar 150546460,758, hal ini berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar 150546460,758 jika Dana Alokasi Khusus sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,016, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1 persen maka Pertumbuhan

Ekonomi akan meningkat sebesar 0,016 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Dana Alokasi Khusus (X_3) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), dengan angka koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar 0,015. Koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,000225 yang berarti 0,0225% variasi pada variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Khusus, sedangkan sisanya 99,98% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai signifikansi sebesar 0,930, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai t_{hitung} 0,083 < t_{tabel} 1,69552 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif namun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan “terdapat pengaruh

positif Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dapat diterima.

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) for windows 20.0 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi (<i>Beta</i>)	$R_{y(1,2,3)}$	$R^2_{y(1,2,3)}$	Sig	F_{hitung}	F_{tabel}	Keterangan
Keterangan	85360134,287	0,868	0,754	0,000	31,628	2,91	Positif
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	0,360						
Dana Alokasi Umum (X_2)	-0,024						
Dana Alokasi Khusus (X_3)	-0,142						

Sumber: *Output SPSS 20.0, data sekunder diolah, 2017*

a) Membuat persamaan garis regresi tiga prediktor

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 9 di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 85360134,287 + 0,360\text{PAD} - 0,024\text{DAU} - 0,142\text{DAK}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

Secara bersama-sama/simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, ditunjukkan dengan koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,868. Besarnya koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) adalah 0,754, hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 75,4%, sedangkan sisanya sebesar 24,6% (100% - 75,4%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Hasil pengujian statistik uji F dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, dan diketahui Ftabel yaitu 2,91 dan Fhitung sebesar 31,628 sehingga Fhitung > Ftabel yang berarti secara simultan seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda tersebut, maka hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat disimpulkan diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya sumbangan relatif dan efektif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Rangkuman Sumbangan Relatif dan Efektif

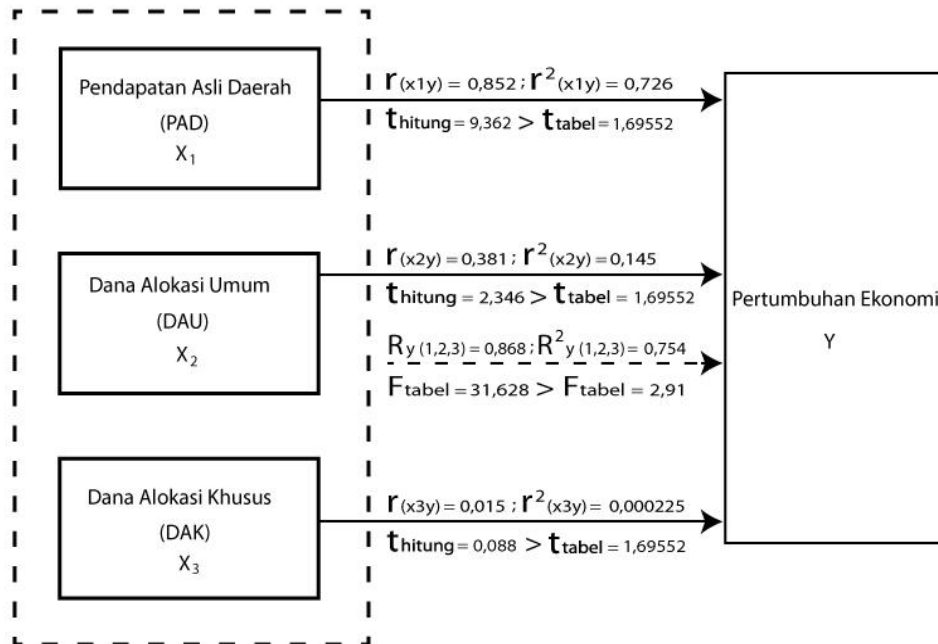
No	Variabel	SR%	SE%
1.	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	114,5%	86,3%
2.	Dana Alokasi Umum (X_2)	- 1,9%	-1,4%
3.	Dana Alokasi Khusus (X_3)	-12,7%	-
	Jumlah	99,9%	75,3%

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017

Berdasarkan analisis menggunakan perhitungan sumbangan relatif dan efektif yang tercantum dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan relatif sebesar 114,5%, Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan sumbangan relatif sebesar -1,9% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan sumbangan relatif sebesar -12,7%. Untuk sumbangan efektif variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 86,3%, sumbangan efektif variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -1,4%, dan sumbangan efektif variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -9,6%. Secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan sumbangan efektif sebesar 75,3%

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sisanya sebesar 24,7% diberikan oleh variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

B. Pembahasan



Gambar 5. Ringkasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan uji t-test, hipotesis pertama menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil pengujian statistik menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_1y}) sebesar 0,852. Koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) sebesar 0,726. Nilai signifikansi

sebesar 0,000, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai $t_{hitung} 9,362 > t_{tabel} 1,6955$. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Secara logika sederhana, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sendirinya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah. Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan lain-lain. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang baik serta diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang benar maka akan semakin besar Pertumbuhan Ekonomi, dengan demikian maka hipotesis pertama diterima.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulan Fauzini (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011, dengan hasil penelitian bahwa secara parsial/individu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dalam pengujian statistik secara parsial menunjukkan koefisien korelasi (r_{x_2y}) sebesar 0,381. Koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,145. Nilai signifikansi sebesar 0,024, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 0,05. Nilai t_{hitung} 2,346 > t_{tabel} 1,69552 maka Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Pertumbuhan Ekonomi akan semakin rendah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dan merupakan konsekuensi penyerahan kewenangan pusat terhadap daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau pelayanan lain. Dana Alokasi Umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Annora Azzahra (2015) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2012, yang menyatakan bahwa secara parsial/individu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dalam pengujian statistik secara parsial menunjukkan koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar 0,015. Koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,000225. Nilai

signifikansi sebesar 0,930, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Nilai t_{hitung} 0,088 < t_{tabel} 1,69552 maka Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif tetapi tidak signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang disebabkan oleh t_{hitung} jauh lebih kecil dibandingkan dengan t_{tabel} dan penyebab lainnya adalah karena rentang yang sangat jauh antara nilai minimum yaitu sebesar Rp. 1.761.900.000 dan nilai maksimum sebesar Rp. 292.199.996.000 dan nilai rata-rata sebesar Rp. 72.663.295.257.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Menurut UU no. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.

Secara logika sederhana, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan sendirinya akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Khusus pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan nilai koefisien regresi positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010-2016. Dengan kata lain peningkatan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode tersebut tidak seiring dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Khusus Dana Alokasi Khusus, hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan nilai koefisien regresi kearah negatif yakni tidak ada pengaruh peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta selama tahun 2010-2016. Dengan kata lain peningkatan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode tersebut tidak seiring dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan pengelolaan Dana Alokasi Umum yang mungkin kurang maksimal, sehingga menyebabkan Dana Alokasi Khusus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Windha Amiga Permanasari (2013) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011). Hasil dari penelitian bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial/individu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan/bersama terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,868 dan besarnya koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) adalah 0,754. Hasil pengujian statistik uji F dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, F_{tabel} yaitu 2,91 dan F_{hitung} sebesar 31,628 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti secara simultan seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan/bersama terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dapat diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Annora Azzahra (2015) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi

Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2012, dengan hasil penelitian bahwa secara simultan/bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh positif terhadap variabel dependent (Y).

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakatnya. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dinilai cukup signifikan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu pembiayaan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu transfer dana dari pusat selain Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari APBN yang ditetapkan dalam UU No.33 tahun 2004. Wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang

ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara langsung tidak berjalan seiring dengan kenaikan Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini terjadi karena realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya jauh lebih kecil dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Akibatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak tergali secara maksimal. Hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan/bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi” diterima.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti hanya mengambil 3 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Periode penelitian ini hanya dari tahun 2010-2016.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan dengan angka koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,852, koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,726 dan nilai t_{hitung} 9,362 > t_{tabel} 1,69552.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan dengan angka koefisien korelasi (r_{x2y}) sebesar 0,381, koefisien determinasi (r^2_{x2y}) sebesar 0,145 dan nilai t_{hitung} 2,346 > t_{tabel} 1,69552.
3. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan dengan angka koefisien korelasi (r_{x3y}) sebesar 0,015, koefisien determinasi (r^2_{x3y}) sebesar 0,000225 dan nilai t_{hitung} 0,088 < t_{tabel} 1,69552.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,868 dan

besarnya koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) adalah 0,754. Hasil pengujian statistik uji F diketahui F_{tabel} yaitu 2,91 dan F_{hitung} sebesar 31,628 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$.

B. Saran

Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bisa menjadi daerah yang mandiri dan secara perlahan bisa melepaskan ketergantungan dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum (DAU) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya bisa bertambah.

4. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Khusus (DAK) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya bisa digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
5. Bagi peneliti selanjutnya agar mengambil populasi selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta dan menambah variabel penelitian yang lebih lengkap dan bervariasi. Penambahan variabel independen lain, baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F.D. (2016). "Pengaruh *Return On Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Price Earning Ratio (PER)* terhadap Harga Saham pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)". *Skripsi*. FE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ardhani, Pungky. (2011). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ariefiantoro, Teguh, Saddewisasi, Wyati. (2011). "Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud* Vol. 13 No. 2.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bhuono, Agung Nugroho. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Boediono, (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Darwanto & Yustikasari, Y. (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal". Makalah *SNA 10*.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Fahrurozi, A. (2014). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Belanja Modal (BM) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2012", *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Fauzyny, Wulan. (2013). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011". *Laporan Penelitian*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Imamul, A. (2007). *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo.
- Mardiasmo. (2007). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Permanasari, W.A. (2013). “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prakarsa, F.D. (2014). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012”. *Laporan Penelitian*. Universitas Brawijaya Malang.
- Purwanto, F.P. (2013). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011)”. *Skripsi*. FE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, Z.E. (2015). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. *Laporan Penelitian*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta.
- Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit FE-UI dan Bina Grafika.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan, Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siswantoro, Dodik, dan Kusnandar. (2012), "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal", *SNA 15*, Banjarmasin.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: penerbit Alfabeta.

Supartoyo, Y.H. & Tatu. J. (2013). The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia. Buletin ekonomi moneter dan perbankan.

Susanti, Hera, dkk. (2000). *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Todaro, M.P. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

www.bps.go.id diakses 6 November 2017

www.djpk.depkeu.go.id diakses 27 November 2017

LAMPIRAN I

Tabel Data Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK)

Provinsi D.I. Yogyakarta

Tahun 2010-2016

Tabel 1. Data Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK Kabupaten/Kota Provinsi D.I.
Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	PAD	DAU	DAK
1	Kulon Progo	2010	3,06	48.589.685	411.293.618	41.614.100
2	Bantul	2010	4,97	81.637.099	573.512.337	60.565.500
3	Gunungkidul	2010	4,15	42.542.031	521.293.704	77.574.200
4	Sleman	2010	4,49	163.056.459	563.320.892	69.847.300
5	Yogyakarta	2010	4,98	179.423.640	395.444.062	13.599.100
6	Kulon Progo	2011	4,23	53.752.294	444.043.865	48.336.500
7	Bantul	2011	5,07	128.896.456	652.060.827	45.919.200
8	Gunungkidul	2011	4,52	54.462.419	572.008.916	59.156.800
9	Sleman	2011	5,42	226.686.250	631.920.733	42.650.300
10	Yogyakarta	2011	5,84	228.870.562	436.129.821	1.761.900
11	Kulon Progo	2012	4,37	74.028.664	531.104.016	45.379.520
12	Bantul	2012	5,33	166.597.778	768.034.584	63.281.450
13	Gunungkidul	2012	4,84	67.050.782	687.944.489	70.584.420
14	Sleman	2012	5,79	301.069.539	795.708.767	52.237.390
15	Yogyakarta	2012	5,40	338.839.606	536.466.614	6.485.350
16	Kulon Progo	2013	4,87	95.992.000	594.979.000	52.894.000
17	Bantul	2013	5,46	224.198.000	854.811.000	47.197.000
18	Gunungkidul	2013	4,97	83.427.000	779.069.000	59.793.000
19	Sleman	2013	5,89	449.270.000	891.590.000	50.823.000
20	Yogyakarta	2013	5,47	383.052.000	597.212.000	6.221.000
21	Kulon Progo	2014	4,57	158.623.927	639.409.211	47.077.300
22	Bantul	2014	5,04	357.411.064	949.252.188	60.914.370
23	Gunungkidul	2014	4,54	159.304.338	847.388.294	46.172.145
24	Sleman	2014	5,30	577.380.071	952.102.502	48.673.210
25	Yogyakarta	2014	5,28	470.634.763	618.742.352	2.249.900
26	Kulon Progo	2015	4,62	170.822.326	657.260.489	53.806.400
27	Bantul	2015	4,97	390.624.492	942.850.827	72.359.660
28	Gunungkidul	2015	4,82	196.099.244	872.566.961	84.971.370
29	Sleman	2015	5,18	643.130.079	984.410.612	57.469.896
30	Yogyakarta	2015	5,09	510.548.822	622.365.351	2.342.700
31	Kulon Progo	2016	4,76	180.273.363	718.490.508	212.673.878
32	Bantul	2016	5,06	404.454.703	999.814.365	292.199.996
33	Gunungkidul	2016	4,89	206.278.865	957.997.369	253.996.628
34	Sleman	2016	5,25	717.151.176	1.014.310.630	240.745.571
35	Yogyakarta	2016	5,11	540.505.305	670.278.830	151.641.280

LAMPIRAN II

Tabel Data Produk Domestik Regional
Bruto
Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2010-2016

Tabel 2
PDRB Provinsi DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2014 (Miliar Rupiah)/
GRDP the Province of DI Yogyakarta at 2010 Constant Market Prices
by Regency/Municipality, 2010-2014 (Billion Rupiahs)

KABUPATEN/KOTA	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
REGENCY/MUNICIPALITY					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kulon Progo	5.033	5.246	5.475	5.742	5.993
02. Kab. Bantul	12.114	12.729	13.407	14.139	14.867
03. Kab. Gunung Kidul	8.848	9.248	9.696	10.177	10.639
04. Kab. Sleman	21.482	22.646	23.957	25.367	26.741
71. Kota Yogyakarta	17.202	18.206	19.189	20.240	21.312
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.	64.679	68.075	71.724	75.665	79.552
Provinsi/Province	64.679	68.050	71.702	75.637	79.557

Tabel 3.
PDRB Provinsi DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015 (Miliar Rupiah)/
GRDP of DI Yogyakarta Province at 2010 Constant Market Prices
by Regency/Municipality, 2011-2015 (Billion Rupiahs)

KABUPATEN/KOTA					
	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
REGENCY/MUNICIPALITY					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kulon Progo	5.246	5.475	5.742	6.003	6.282
02. Kab. Bantul	12.729	13.407	14.139	14.867	15.611
03. Kab. Gunung Kidul	9.248	9.696	10.177	10.639	11.152
04. Kab. Sleman	22.646	23.957	25.367	26.741	28.160
71. Kota Yogyakarta	18.206	19.189	20.240	21.312	22.412
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.	68.075	71.724	75.665	79.562	83.616
Provinsi/Province	68.050	71.702	75.627	79.532	83.462

Tabel 4.
PDRB Provinsi DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2016 (Miliar Rupiah)/
GRDP of DI Yogyakarta Province at 2010 Constant Market Prices
by Regency/Municipality, 2012-2016 (Billion Rupiahs)

KABUPATEN/KOTA					
	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
REGENCY/MUNICIPALITY					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kulon Progo	5.475	5.742	6.004	6.282	6.581
02. Kab. Bantul	13.407	14.139	14.851	15.589	16.378
03. Kab. Gunung Kidul	9.696	10.177	10.640	11.152	11.697
04. Kab. Sleman	23.957	25.367	26.713	28.098	29.574
71. Kota Yogyakarta	19.189	20.240	21.308	22.393	23.538
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.	71.724	75 665	79.516	83.514	87.768
Provinsi/Province	71.702	75 627	79.536	83.474	87.688

LAMPIRAN III

Tabel Realisasi Penerimaan Pemerintah
Kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2010-2016

Tabel 5

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI
D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT
D. I. YOGYAKARTA BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011**

Kabupaten/ Regency : Kulon Progo

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	633 397 962	655 604 967
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	48 589 685	49 488 455
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	4 310 294	4 121 988
Retribusi Daerah	8 036 552	9 519 209
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 740 518	5 411 132
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	31 502 321	30 436 126
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	485 094 125	516 711 194
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	32 039 165	23 272 193
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	147 242	847 363
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	411 293 618	444 247 738
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	41 614 100	48 343 900
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	99 714 152	89 405 318
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	47 497 978	32 541 663
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	680 895 940	688 146 630
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

Tabel 6

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI
D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT**

D. I. YOGYAKARTA BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011

Kabupaten/ Regency : Bantul

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	986 866 901	900 867 639
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	81 637 099	106 885 124
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	16 541 250	28 752 000
Retribusi Daerah	15 978 422	21 452 299
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 424 932	7 546 000
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	41 692 495	49 134 825
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	688 676 567	707 595 997
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	50 844 593	32 646 561
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 754 137	3 674 036
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	573 512 337	625 350 000
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	60 565 500	45 925 400
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	216 553 235	86 386 518
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	61 043 923	16 336 945
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 047 910 824	917 204 584
<i>APBD / Regional budgeted.</i>		

Tabel 7
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI
D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT
D. I. YOGYAKARTA BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011

Kabupaten/ Regency : Gunung Kidul		
Jenis Penerimaan		
<i>Revenues items</i>	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	798 248 875	843 349 755
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	42 542 031	41 835 405
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	5 948 838	6 978 000
Retribusi Daerah	25 079 536	8 656 638
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 731 777	4 293 412
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	6 781 880	21 907 355
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	633 692 367	664 710 733
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	34 689 415	31 284 872
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	135 048	1 957 157
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	521 293 704	572 300 004
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	77 574 200	59 168 700
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	122 014 477	136 803 617
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	59 307 651	91 349 566
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	857 556 526	934 699 321
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

tabel 8

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI
D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT
D. I. YOGYAKARTA BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011**

Kabupaten/ Regency : Sleman

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 095 628 887	1 272 583 653
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	163 056 459	170 916 683
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	80 611 543	90 200 165
Retribusi Daerah	59 110 504	30 068 639
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 169 825	11 027 000
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	13 164 587	39 620 879
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	740 198 028	769 572 791
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	104 361 867	92 604 485
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 667 969	2 397 343
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	563 320 892	631 920 663
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	69 847 300	42 650 300
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	192 374 400	332 094 179
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	164 125 627	111 413 378
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 259 754 514	1 383 997 031
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

Tabel 9

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI
D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT
D. I. YOGYAKARTA BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011**

Kota/ Municipality: Yogyakarta		
Jenis Penerimaan		
<i>Revenues items</i>	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	815 495 925	792 008 136
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	179 423 640	182 785 819
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	78 254 579	80 425 500
Retribusi Daerah	32 214 651	32 611 090
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11 031 305	11 031 304
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	57 923 105	58 717 925
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	484 628 283	519 034 652
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	73 460 190	78 799 712
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 124 931	2 132 907
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	395 444 062	436 339 933
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	13 599 100	1 762 100
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	151 444 002	90 187 665
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	100 104 878	98 325 617
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	915 600 803	890 333 753
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

Tabel 10. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2011

Uraian	Kab. Kulon Progo
Pendapatan	791,827
PAD	53,752
Pajak daerah	5,854
Retribusi daerah	8,451
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4,936
Lain-lain PAD yang sah	34,511
Pendapatan Transfer	716,344
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	522,277
Dana Bagi Hasil Pajak	29,592
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	305
Dana alokasi umum	444,044
Dana alokasi khusus	48,337
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	164,558
Dana Otonomi Khusus	-
Dana Penyesuaian	164,558
Transfer Pemerintah Provinsi	29,509
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29,509
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	21,731
Pendapatan Hibah	21,731
Pendapatan Dana Darurat	-
Pendapatan Lainnya	-

Tabel 11. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2011

Uraian	Kab. Bantul
Pendapatan	1,180,547
PAD	128,896
Pajak daerah	35,067
Retribusi daerah	17,799
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7,291
Lain-lain PAD yang sah	68,738
Dana Perimbangan	717,123
DBH	46,143
DAU	625,061
DAK	45,919
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	334,527
Hibah	-
Dana darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	53,144
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	102,331
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	37,649
Lain-lain	141,404

Tabel 12. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGGIDUL MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun
2011

Uraian	Kab. Gunung Kidul
Pendapatan	965,826
PAD	54,462
Pajak daerah	8,130
Retribusi daerah	11,384
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4,259
Lain-lain PAD yang sah	30,689
Dana Perimbangan	667,005
DBH	35,839
DAU	572,009
DAK	59,157
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	244,359
Hibah	-
Dana darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	30,917
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	185,897
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	27,545
Lain-lain	-

Tabel 13. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2011

Uraian	Kab. Sleman
Pendapatan	1,311,474
PAD	226,686
Pajak daerah	142,698
Retribusi daerah	33,164
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11,036
Lain-lain PAD yang sah	39,788
Pendapatan Transfer	1,062,766
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	753,889
Dana Bagi Hasil Pajak	76,229
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3,089
Dana alokasi umum	631,921
Dana alokasi khusus	42,650
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	206,591
Dana Otonomi Khusus	206,591
Dana Penyesuaian	-
Transfer Pemerintah Provinsi	102,285
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94,205
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	8,080
Lain-lain Pendapatan yang sah	21,985
Pendapatan Hibah	21,985
Pendapatan Dana Darurat	-
Pendapatan Lainnya	-

Tabel 14. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2011

Uraian	Kota Yogyakarta
Pendapatan	951,681
PAD	228,871
Pajak daerah	120,458
Retribusi daerah	34,408
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10,121
Lain-lain PAD yang sah	63,883
Dana Perimbangan	500,614
DBH	62,722
DAU	436,130
DAK	1,762
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	222,197
Hibah	3,345
Dana darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	60,273
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	125,374
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	-
Lain-lain	33,205

Tabel 15
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DI
YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF KULON PROGO, DI YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ Regency : Kulon Progo

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	882 586 664	918 782 460
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	74 028 664	64 750 332
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	8 448 290	7 625 374
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	11 655 375	12 195 609
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 765 041	7 562 640
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	47 159 958	37 366 709
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	612 419 550	675 803 314
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	35 583 393	27 651 379
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	352 621	279 005
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	531 104 016	594 978 790
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	45 379 520	52 894 140
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	196 138 450	178 228 814
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	72 791 482	18 341 263
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	955 378 146	937 123 723
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

Tabel 16
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ Regency : Bantul

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 337 570 725	1 337 731 871
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	166 597 778	170 006 171
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	51 768 352	59 042 000
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	20 595 099	24 586 237
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 184 263	9 015 869
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	86 050 064	77 362 065
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	885 352 411	923 582 867
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	49 864 791	18 746 561
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4 171 586	2 828 792
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	768 034 584	854 810 634
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	63 281 450	47 196 880
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	285 620 536	244 142 833
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	62 686 563	42 620 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 400 257 288	1 380 351 871
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

Tabel 17

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI DI
YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDUL, DI YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013**

Kabupaten/ Regency : Gunung Kidul

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 076 501 995	1 172 722 552
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	67 050 782	66 710 859
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	10 728 490	9 949 000
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	19 667 336	22 286 629
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 329 405	5 427 611
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	31 325 551	29 047 619
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	799 932 048	879 073 987
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	39 140 931	32 574 795
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 262 208	2 146 344
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	687 944 489	779 069 238
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	70 584 420	65 283 610
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	209 519 165	226 937 706
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	115 388 455	69 386 440
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 191 890 450	1 242 108 992
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

Tabel 18
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ Regency : Sleman

Jenis Penerimaan	2012	2013 *)
<i>Revenues items</i>		
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 589 722 974	1 670 168 665
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	301 069 539	298 406 947
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	177 835 870	190 350 000
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	34 034 970	30 437 957
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 783 122	13 855 000
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	76 415 577	63 763 990
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	946 821 049	992 216 461
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	95 851 409	49 803 219
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 023 483	0
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	795 708 767	891 589 912
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	52 237 390	50 823 330
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	341 832 386	379 545 257
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	138 694 509	82 773 161
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 728 417 483	1 752 941 826
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

Tabel 19
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI DI YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL RECEIPT OF MUNICIPALITY GOVERNMENT OF YOGYAKARTA, DI
YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

<i>Kota/ Municipality: Yogyakarta</i>		
Jenis Penerimaan		
<i>Revenues items</i>	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 158 134 797	1 071 527 411
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	338 839 606	304 797 499
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	208 329 209	192 838 244
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	38 770 585	32 931 371
<i>Local Revenues</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11 496 627	11 546 396
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	80 243 185	67 481 488
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	602 310 072	656 301 045
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	56 908 483	50 551 709
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 449 625	2 316 497
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	536 466 614	597 212 209
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	6 485 350	6 220 630
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	216 985 119	110 428 867
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	95 482 328	74 799 020
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 253 617 125	1 146 326 431
<i>APBD / Regional bugeted</i>		

Tabel 20. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2013

Uraian	Kab. Kulon Progo
Pendapatan	1,003,179
PAD	95,992
Pajak daerah	8,696
Retribusi daerah	14,987
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8,253
Lain-lain PAD yang sah	64,056
Pendapatan Transfer	886,199
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	681,455
Dana Bagi Hasil Pajak	33,215
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	367
Dana Alokasi Umum	594,979
Dana Alokasi Khusus	52,894
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	163,769
Dana Otonomi Khusus	-
Dana Penyesuaian	163,769
Transfer Pemerintah Provinsi	40,975
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40,975
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	20,989
Pendapatan Hibah	20,989
Pendapatan Dana Darurat	-
Pendapatan Lainnya	-

Tabel 21. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2013

Uraian	Kab. Bantul
Pendapatan	1,520,303
PAD	224,198
Pajak daerah	83,232
Retribusi daerah	27,116
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9,508
Lain-lain PAD yang sah	104,341
Dana Perimbangan	938,492
DBH	36,485
DAU	854,811
DAK	47,197
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	357,613
Hibah	4,932
Dana Darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	77,299
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	246,783
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	28,599
Lain-lain	-

Tabel 22. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2013

Uraian	Kab. Gunung Kidul
Pendapatan	1,242,093
PAD	83,427
Pajak daerah	12,351
Retribusi daerah	25,025
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6,815
Lain-lain PAD yang sah	39,237
Pendapatan Transfer	1,122,442
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	877,415
Dana Bagi Hasil Pajak	36,073
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2,479
Dana Alokasi Umum	779,069
Dana Alokasi Khusus	59,793
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	199,359
Dana Otonomi Khusus	-
Dana Penyesuaian	199,359
Transfer Pemerintah Provinsi	45,668
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45,668
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	36,223
Pendapatan Hibah	-
Pendapatan Dana Darurat	-
Pendapatan Lainnya	36,223

Tabel 23. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2013

Uraian	Kab. Sleman
Pendapatan	1,899,526
PAD	449,270
Pajak daerah	274,629
Retribusi daerah	48,002
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15,552
Lain-lain PAD yang sah	111,088
Dana Perimbangan	992,782
DBH	50,369
DAU	891,590
DAK	50,823
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	457,473
Hibah	1,016
Dana Darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	134,452
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	32,095
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	28,336
Lain-lain	261,573

Tabel 24. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (jutaan rupiah) tahun 2013

Uraian	Kota Yogyakarta
Pendapatan	1,309,580
PAD	383,052
Pajak daerah	227,749
Retribusi daerah	40,339
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12,596
Lain-lain PAD yang sah	102,368
Pendapatan Transfer	914,763
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	658,771
Dana Bagi Hasil Pajak	52,704
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2,634
Dana Alokasi Umum	597,212
Dana Alokasi Khusus	6,221
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	177,684
Dana Otonomi Khusus	-
Dana Penyesuaian	177,684
Transfer Pemerintah Provinsi	78,308
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	78,308
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	11,765
Pendapatan Hibah	-
Pendapatan Dana Darurat	-
Pendapatan Lainnya	11,765

Tabel 25
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DI
YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2014-2015
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF KULON PROGO, DI YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kabupaten/ Regency : Kulon Progo

Jenis Penerimaan	2014	2015 *)
<i>Revenues items</i>		
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 120 424 776	1 242 007 552
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	158 623 927	187 802 917
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	21 171 477	35 342 785
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	6 777 315	20 096 134
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 176 928	12 055 938
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	120 498 207	120 308 060
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	708 270 656	734 892 173
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	21 321 407	22 871 981
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	462 738	954 053
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	639 409 211	657 260 489
<i>General Alocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	47 077 300	53 805 650
<i>Special Alocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	253 530 193	319 312 462
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	102 436 693	79 722 917
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 222 861 469	1 321 730 469
<i>APBD / Regional budget</i>		

Tabel 26
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI
YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2014-2015
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kabupaten/
 Regency : Bantul

Jenis Penerimaan <i>Revenues items</i>	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 813 917 143	1 857 098 631
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenues</i>	357 411 064	312 419 914
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	99 558 471	85 000 100
1.2. Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	26 004 714	26 774 227
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	12 643 382	16 049 618
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenues</i>	219 204 497	184 595 969
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 036 632 898	1 037 859 455
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	21 545 802	28 819 599
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4 920 538	5 086 159
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	949 252 188	942 850 827
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	60 914 370	61 102 870
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenues</i>	419 873 181	506 819 262
PEMBIAYAAN DAERAH	213 163 271	148 713 261
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	2 027 080 414	2 005 811 892
<i>APBD / Regional budget</i>		

Tabel 27
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI DI
YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2014-2015
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDUL, DI YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kabupaten/ Regency : Gunung Kidul

Jenis Penerimaan	2014	2015 *)
<i>Revenues items</i>		
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 372 846 296	1 543 409 255
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	159 304 338	145 856 403
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	28 477 675	28 083 980
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	25 682 892	24 197 966
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 939 324	8 111 442
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	97 204 447	85 463 015
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	923 974 088	972 629 597
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	28 147 376	24 989 192
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 266 273	2 302 064
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	847 388 294	872 566 961
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	46 172 145	72 771 380
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	289 567 870	424 923 255
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	160 662 056	117 545 240
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 533 508 352	1 660 954 495

Tabel 28
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI
YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2014-2015
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kabupaten/ Regency	: Sleman		
Jenis Penerimaan Revenues items	2014**)	2015 *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENDAPATAN DAERAH	2 126 563 210	2 262 230 418	
LOCAL GOVERNMENT REVENUES			
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenues</i>	577 380 071	577 585 009	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	352 939 612	346 000 000	
1.2. Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	61 689 393	41 145 280	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	19 986 059	34 169 551	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenues</i>	142 765 007	156 270 178	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 049 109 194	1 101 084 018	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	45 012 275	49 762 536	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 321 207	5 693 954	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	952 102 502	984 410 612	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	48 673 210	61 216 916	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenues</i>	500 073 945	583 561 391	
B. PEMBIAYAAN DAERAH	380 744 870	534 724 665	
LOCAL GOVERNMENT FINANCING			
JUMLAH/TOTAL	2 507 308 080	2 796 955 083	

*) APBD / Regional budget

**) Angka Estimasi

Tabel 29
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI DI
YOGYAKARTA
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2014-2015
ACTUAL RECEIPT OF MUNICIPALITY GOVERNMENT OF YOGYAKARTA, DI
YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kota/ Municipality: Yogyakarta

Jenis Penerimaan	2014	2015 *)
<i>Revenues items</i>		
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 459 735 669	1 423 571 674
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
1. Pendapatan Asli Daerah	470 634 763	449 849 109
<i>Original Local Government Revenues</i>		
1.1. Pajak Daerah	253 996 304	274 936 949
<i>Local Taxes</i>		
1.2. Retribusi Daerah	56 898 390	38 808 144
<i>Local Retributions</i>		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 087 531	14 087 531
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	145 652 538	122 016 485
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
2. Dana Perimbangan	663 712 266	669 080 432
<i>Balanced Budget</i>		
2.1. Bagi Hasil Pajak	40 319 358	44 053 832
<i>Tax Share</i>		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 400 656	2 100 149
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
2.3. Dana Alokasi Umum	618 742 352	622 365 351
<i>General Allocation Funds</i>		
2.4. Dana Alokasi Khusus	2 249 900	561 100
<i>Special Allocation Funds</i>		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	325 388 640	304 642 133
<i>Other Legal Revenues</i>		
B. PEMBIAYAAN DAERAH	311 627 540	367 728 260
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 771 363 209	1 791 299 934

*) APBD / Regional budget

Tabel 30
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DI
YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2015-2016
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF KULON PROGO, DI YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2015-2016

Kabupaten/ *Regency* : Kulon Progo

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 227 474 673	1 428 564 823
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	170 822 327	172 434 611
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	25 526 939	37 289 401
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	6 965 714	10 248 939
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 534 501	13 035 451
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	127 795 173	111 860 820
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	729 998 680	1 062 502 098
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	17 834 830	24 783 886
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 096 961	1 316 823
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	657 260 489	718 490 508
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	53 806 400	317 910 881
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	326 653 666	193 628 114
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	146 162 575	64 912 510
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 373 637 248	1 493 477 333
<i>APBD / Regional budget</i>		

Tabel 31
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA

MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2015-2016
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2015-2016

Kabupaten/ Regency : Bantul

Jenis Penerimaan	2015	2016 *)
<i>Revenues items</i>		
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 951 223 237	2 077 645 142
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	390 624 492	349 492 790
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	123 257 184	104 668 270
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	22 840 343	21 918 542
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18 379 740	19 314 676
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	226 147 225	203 591 302
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	1 041 842 461	1 152 588 359
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	20 825 979	28 819 599
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 805 995	4 517 335
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	942 850 827	999 814 365
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	72 359 660	119 437 060
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	518 756 284	575 563 993
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	298 601 810	169 729 492
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	2 249 825 047	2 247 374 634
<i>APBD / Regional budget</i>		

Tabel 32
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI DI
YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2015-2016
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDUL, DI YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2015-2016

Kabupaten/ Regency : Gunung Kidul

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 599 005 995	1 739 998 449
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	196 099 245	172 352 154
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	36 178 236	32 852 300
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	28 059 629	28 712 666
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 584 694	10 291 070
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	121 276 686	100 496 118
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	978 310 012	1 371 136 459
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	18 016 718	24 553 302
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 754 963	2 963 903
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	872 566 961	954 997 369
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	84 971 370	388 621 885
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	424 596 738	196 509 836
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	242 366 516	43 171 590
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 841 372 511	1 783 170 039
<i>APBD / Regional budget</i>		

Tabel 33
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA

MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2015-2016
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE
BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2015-2016

Kabupaten/ Regency : Sleman

Jenis Penerimaan

<i>Revenues items</i>	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 294 622 765	2 356 293 841
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	643 130 080	614 410 594
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	373 137 768	367 200 000
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	45 086 332	42 383 975
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34 330 599	36 647 000
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	190 575 381	168 179 619
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	1 080 162 445	1 519 169 465
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	37 574 825	60 742 305
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	707 112	1 090 812
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	984 410 612	1 014 310 630
<i>General Alocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	57 469 896	443 025 718
<i>Special Alocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	571 330 240	222 713 782
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	530 486 040	154 476 387
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	2 825 108 805	2 510 770 228
<i>APBD / Regional budget</i>		

Tabel 34
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI DI YOGYAKARTA

MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2015-2016
ACTUAL RECEIPT OF MUNICIPALITY GOVERNMENT OF YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA
PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2015-2016

<i>Kota/ Municipality: Yogyakarta</i>		
Jenis Penerimaan		
<i>Revenues items</i>	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 434 009 588	1 631 765 405
LOCAL GOVERNMENT REVENUES		
Pendapatan Asli Daerah	510 548 823	503 488 602
<i>Original Local Government Revenues</i>		
Pajak Daerah	304 068 623	314 421 000
<i>Local Taxes</i>		
Retribusi Daerah	40 057 651	38 200 198
<i>Local Retributions</i>		
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 938 168	14 989 732
<i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
Lain-lain PAD yang Sah	153 484 381	135 877 672
<i>Other Original Local Gov. Revenues</i>		
Dana Perimbangan	652 748 113	967 286 299
<i>Balanced Budget</i>		
Bagi Hasil Pajak	25 539 278	53 114 808
<i>Tax Share</i>		
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 500 784	2 598 950
<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
Dana Alokasi Umum	622 365 351	670 278 830
<i>General Allocation Funds</i>		
Dana Alokasi Khusus	2 342 700	241 293 711
<i>Special Allocation Funds</i>		
Lain-lain Pendapatan yang Sah	270 712 652	160 990 504
<i>Other Legal Revenues</i>		
PEMBIAYAAN DAERAH	434 785 927	256 860 035
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	1 868 795 515	1 888 625 440
<i>APBD / Regional budget</i>		

Tabel 35. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribuan rupiah) tahun 2016

uraian	Kab. Kulon Progo
Pendapatan	1,358,070,874
PAD	180,273,363
Pajak daerah	31,393,835
Retribusi daerah	9,857,662
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14,317,819
Lain-lain PAD yang sah	124,704,046
Pendapatan Transfer	1,161,030,011
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	957,551,588
Dana Bagi Hasil Pajak	25,797,654
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	589,547
Dana Alokasi Umum	718,490,508
Dana Alokasi Khusus	212,673,878
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	99,744,600
Dana Otonomi Khusus	
Dana Penyesuaian	99,744,600
Transfer Pemerintah Provinsi	103,733,822
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76,355,539
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	27,378,283
Lain-lain Pendapatan yang sah	16,767,499
Pendapatan Hibah	16,767,499
Pendapatan Dana Darurat	
Pendapatan Lainnya	

Tabel 36. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribuan rupiah) tahun 2016

uraian	Kab. Bantul
Pendapatan	2,000,334,166
PAD	404,454,703
Pajak daerah	133,474,742
Retribusi daerah	26,613,085
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	21,068,269
Lain-lain PAD yang sah	223,298,606
Pendapatan Transfer	1,568,402,927
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,331,352,777
Dana Bagi Hasil Pajak	34,632,858
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4,705,557
Dana Alokasi Umum	999,814,365
Dana Alokasi Khusus	292,199,996
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	99,912,945
Dana Otonomi Khusus	
Dana Penyesuaian	99,912,945
Transfer Pemerintah Provinsi	137,137,204
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	137,137,204
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
Lain-lain Pendapatan yang sah	27,476,535
Pendapatan Hibah	6,148,735
Pendapatan Dana Darurat	
Pendapatan Lainnya	21,327,800

Tabel 37. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGGIDUL MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribuan rupiah) tahun
2016

Uraian	Kab. Gunung Kidul
Pendapatan	1,654,344,836
PAD	206,278,865
Pajak daerah	37,544,018
Retribusi daerah	32,082,077
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12,940,951
Lain-lain PAD yang sah	123,711,818
Pendapatan Transfer	1,444,567,971
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,239,624,998
Dana Bagi Hasil Pajak	28,240,324
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2,390,677
Dana Alokasi Umum	954,997,369
Dana Alokasi Khusus	253,996,628
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	105,326,318
Dana Otonomi Khusus	
Dana Penyesuaian	105,326,318
Transfer Pemerintah Provinsi	99,616,654
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84,826,454
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	14,790,200
Lain-lain Pendapatan yang sah	3,498,000
Pendapatan Hibah	3,498,000
Pendapatan Dana Darurat	
Pendapatan Lainnya	

Tabel 38. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribuan rupiah) tahun 2016

Uraian	Kab. Sleman
Pendapatan	2,329,097,456
PAD	717,151,176
Pajak daerah	407,675,230
Retribusi daerah	43,217,124
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	42,031,674
Lain-lain PAD yang sah	224,227,146
Pendapatan Transfer	1,594,716,561
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,321,660,504
Dana Bagi Hasil Pajak	66,148,677
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	455,626
Dana Alokasi Umum	1,014,310,630
Dana Alokasi Khusus	240,745,571
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	68,014,717
Dana Otonomi Khusus	
Dana Penyesuaian	68,014,717
Transfer Pemerintah Provinsi	205,041,339
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	205,041,339
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
Lain-lain Pendapatan yang sah	17,229,718
Pendapatan Hibah	8,947,518
Pendapatan Dana Darurat	
Pendapatan Lainnya	8,282,200

Tabel 39. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribuan rupiah) tahun
2016

Uraian	Kota Yogyakarta
Pendapatan	1,577,679,933
PAD	540,504,305
Pajak daerah	334,057,894
Retribusi daerah	42,111,064
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16,270,773
Lain-lain PAD yang sah	148,064,573
Pendapatan Transfer	1,034,082,627
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	875,430,545
Dana Bagi Hasil Pajak	51,500,005
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2,010,429
Dana Alokasi Umum	670,278,830
Dana Alokasi Khusus	151,641,280
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	40,424,864
Dana Otonomi Khusus	
Dana Penyesuaian	40,424,864
Transfer Pemerintah Provinsi	118,227,218
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108,491,618
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9,735,600
Lain-lain Pendapatan yang sah	3,093,000
Pendapatan Hibah	3,093,000
Pendapatan Dana Darurat	
Pendapatan Lainnya	

LAMPIRAN IV

Tabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2010-2016

Tabel 40. Data Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010

No	Nama Kabupaten dan Kota	PE	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Kulon Progo	3,06	48.589.685	411.293.618	41.614.100
2	Kab. Bantul	4,97	81.637.099	573.512.337	60.565.500
3	Kab. Gunungkidul	4,15	42.542.031	521.293.704	77.574.200
4	Kab. Sleman	4,49	163.056.459	563.320.892	69.847.300
5	Kota Yogyakarta	4,98	179.423.640	395.444.062	13.599.100

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2010

Tabel 41. Data Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011

No	Nama Kabupaten dan Kota	PE	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Kulon Progo	4,23	53.752.294	444.043.865	48.336.500
2	Kab. Bantul	5,07	128.896.456	652.060.827	45.919.200
3	Kab. Gunungkidul	4,52	54.462.419	572.008.916	59.156.800
4	Kab. Sleman	5,42	226.686.250	631.920.733	42.650.300
5	Kota Yogyakarta	5,84	228.870.562	436.129.821	1.761.900

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2011

Tabel 42. Data Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012

No	Nama Kabupaten dan Kota	PE	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Kulon Progo	4,37	74.028.664	531.104.016	45.379.520
2	Kab. Bantul	5,33	166.597.778	768.034.584	63.281.450
3	Kab. Gunungkidul	4,84	67.050.782	687.944.489	70.584.420
4	Kab. Sleman	5,79	301.069.539	795.708.767	52.237.390
5	Kota Yogyakarta	5,40	338.839.606	536.466.614	6.485.350

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2012

Tabel 43. Data Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013

No	Nama Kabupaten dan Kota	PE	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Kulon Progo	4,87	95.992.000	594.979.000	52.894.000
2	Kab. Bantul	5,46	224.198.000	854.811.000	47.197.000
3	Kab. Gunungkidul	4,97	83.427.000	779.069.000	59.793.000
4	Kab. Sleman	5,89	449.270.000	891.590.000	50.823.000
5	Kota Yogyakarta	5,47	383.052.000	597.212.000	6.221.000

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2013

Tabel 44. Data Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014

No	Nama Kabupaten dan Kota	PE	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Kulon Progo	4,57	158.623.927	639.409.211	47.077.300
2	Kab. Bantul	5,04	357.411.064	949.252.188	60.914.370
3	Kab. Gunungkidul	4,54	159.304.338	847.388.294	46.172.145
4	Kab. Sleman	5,30	577.380.071	952.102.502	48.673.210
5	Kota Yogyakarta	5,28	470.634.763	618.742.352	2.249.900

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2014

Tabel 45. Data Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015

No	Nama Kabupaten dan Kota	PE	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Kulon Progo	4,62	170.822.326	657.260.489	53.806.400
2	Kab. Bantul	4,97	390.624.492	942.850.827	72.359.660
3	Kab. Gunungkidul	4,82	196.099.244	872.566.961	84.971.370
4	Kab. Sleman	5,18	643.130.079	984.410.612	57.469.896
5	Kota Yogyakarta	5,09	510.548.822	622.365.351	2.342.700

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2015

Tabel 46. Data Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016

No	Nama Kabupaten dan Kota	PE	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Kulon Progo	4,76	180.273.363	718.490.508	212.673.878
2	Kab. Bantul	5,06	404.454.703	999.814.365	292.199.996
3	Kab. Gunungkidul	4,89	206.278.865	957.997.369	253.996.628
4	Kab. Sleman	5,25	717.151.176	1.014.310.630	240.745.571
5	Kota Yogyakarta	5,11	540.505.305	670.278.830	151.641.280

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2016

Tabel 47. Data Realisasi Pokok Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	Nama Kabupaten dan Kota	PE	PAD	DAU	DAK
1	Kab. Kulon Progo	30,48	782.082.259	3.996.580.707	501.781.698
2	Kab. Bantul	35,90	1.753.819.592	5.740.336.128	642437176
3	Kab. Gunungkidul	32,73	809.164.679	5.238.268.733	652248563
4	Kab. Sleman	37,32	3.077.743.574	5.833.364.136	562446667
5	Kota Yogyakarta	37,17	2.651.874.698	3.876.639.030	184301230

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016

LAMPIRAN V

Laporan Data Realisasi Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Tahun 2010-2016

Tabel 48. Data Realisasi Pokok Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	Nama Kabupaten dan Kota	PDRB							Jumlah T PDRB
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kab. Kulon Progo	5.033	5.246	5.475	5.742	6.004	6.282	6.581	40.363
2	Kab. Bantul	12.114	12.729	13.407	14.139	14.851	15.589	16.378	99.207
3	Kab. Gunungkidul	8.848	9.248	9.696	10.177	10.640	11.152	11.697	71.458
4	Kab. Sleman	21.482	22.646	23.957	25.367	26.713	28.098	29.574	177.83
5	Kota Yogyakarta	17.202	18.206	19.189	20.240	21.308	22.393	23.538	142.07

Ket: dalam jutaan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016

LAMPIRAN VI

Laporan Data Realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Tahun 2010-2016

Tabel 49. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010

No	Nama Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah				Total PAD
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	Kab. Kulon Progo	4.310.294	8.036.552	4.740.518	31.502.321	48.589.685
2	Kab. Bantul	16.541.250	15.978.422	7.424.932	41.692.495	81.637.099
3	Kab. Gunungkidul	5.948.838	25.079.536	4.731.777	6.781.880	42.542.031
4	Kab. Sleman	80.611.543	59.110.504	10.169.825	13.164.587	163.056.459
5	Kota Yogyakarta	78.254.579	32.214.651	11.031.305	57.923.105	179.423.640

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2010

Tabel 50. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011

No	Nama Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah				Total PAD
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	Kab. Kulon Progo	5.853.810	8.450.599	4.936.479	34.511.406	53.752.299
2	Kab. Bantul	35.066.592	17.798.604	7.290.930	68.738.330	128.896.456
3	Kab. Gunungkidul	8.129.852	11.384.305	4.259.233	30.689.029	54.462.419
4	Kab. Sleman	142.698.407	33.163.698	11.036.188	39.787.957	226.686.252
5	Kota Yogyakarta	120.457.516	34.408.439	10.121.340	63.883.267	228.870.562

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2011

Tabel 51. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012

No	Nama Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah				Total PAD
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	Kab. Kulon Progo	8.448.290	11.655.375	6.765.041	47.159.958	74.028.664
2	Kab. Bantul	51.768.352	20.595.099	8.184.263	86.050.064	166.597.778
3	Kab. Gunungkidul	10.728.490	19.667.336	5.329.405	31.325.551	67.050.782
4	Kab. Sleman	177.835.870	34.034.970	12.783.122	76.415.577	301.069.539
5	Kota Yogyakarta	208.329.209	38.770.585	11.496.627	80.243.185	338.839.606

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2012

Tabel 52. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013

No	Nama Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah				Total PA
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	Kab. Kulon Progo	8.696.000	14.987.000	8.253.000	64.056.000	95.992.000
2	Kab. Bantul	83.232.000	27.116.000	9.508.000	104.341.000	224.198.000
3	Kab. Gunungkidul	12.351.000	25.025.000	6.815.000	39.237.000	83.427.000
4	Kab. Sleman	274.629.000	48.002.000	15.552.000	111.088.000	449.270.000
5	Kota Yogyakarta	227.749.000	40.339.000	12.596.000	102.368.000	383.052.000

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2013

Tabel 53. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014

No	Nama Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah				Total PAD
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	Kab. Kulon Progo	21.171.477	6.777.315	10.176.928	120.498.207	158.623.92
2	Kab. Bantul	99.558.471	26.004.714	12.643.382	219.204.497	357.411.06
3	Kab. Gunungkidul	28.477.675	25.682.892	7.939.324	97.204.447	159.304.33
4	Kab. Sleman	352.939.612	61.689.393	19.986.059	142.765.007	577.380.07
5	Kota Yogyakarta	253.996.304	56.898.390	14.087.531	145.652.538	470.634.76

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2014

Tabel 54. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015

No	Nama Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah				Total PA
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	Kab. Kulon Progo	25.526.939	6.965.714	10.534.501	127.795.173	170.822.3
2	Kab. Bantul	123.257.184	22.840.343	18.379.740	226.147.225	390.624.4
3	Kab. Gunungkidul	36.178.236	28.059.629	10.584.694	121.276.686	196.099.2
4	Kab. Sleman	373.137.768	45.086.332	34.330.599	190.575.381	643.130.0
5	Kota Yogyakarta	304.068.623	40.057.651	12.938.168	153.484.381	510.548.8

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2015

Tabel 55. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016

No	Nama Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah				Total PA
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	Kab. Kulon Progo	31.393.835	9.857.662	14.317.819	124.704.046	180.273.3
2	Kab. Bantul	133.474.742	26.613.085	21.068.269	223.298.606	404.454.7
3	Kab. Gunungkidul	37.544.018	32.082.077	12.940.951	123.711.818	206.278.8
4	Kab. Sleman	407.675.231	43.217.124	42.031.674	224.227.146	717.151.1
5	Kota Yogyakarta	334.057.894	42.111.064	16.270.773	148.064.574	540.504.3

Ket: dalam ribuan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2016

Tabel 56. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	Nama Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah							Jumlah Total P
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kab. Kulon Progo	48.590	55.752	74.029	95.992	158.624	170.822	180.273	784.08
2	Kab. Bantul	81.637	128.896	166.598	224.198	357.411	390.624	404.455	1.753.8
3	Kab. Gunungkidul	42.542	54.462	67.051	83.427	159.304	196.099	206.279	809.16
4	Kab. Sleman	163.065	226.723	301.070	449.270	577.380	643.130	717.151	3.077.7
5	Kota Yogyakarta	179.424	228.871	338.840	383.052	470.635	510.549	540.504	2.651.8

Ket: dalam jutaan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016

LAMPIRAN VII

Laporan Data Realisasi Dana Alokasi
Umum (DAU)

Tahun 2010-2016

Tabel 57. Data Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	Nama Kabupaten dan Kota	Dana Alokasi Umum							Jun To D.
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kab. Kulon Progo	411.294	444.044	531.104	594.979	639.409	657.260	718.491	1.37
2	Kab. Bantul	573.512	625.061	768.035	854.811	949.252	942.851	999.814	5.71
3	Kab. Gunungkidul	521.294	572.009	687.944	779.069	847.388	872.567	954.997	5.23
4	Kab. Sleman	563.321	631.921	795.709	891.590	952.103	984.411	1.104.311	5.92
5	Kota Yogyakarta	395.444	436.130	536.467	597.212	618.742	622.365	670.279	3.87

Ket: dalam jutaan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016

LAMPIRAN VIII

Laporan Data Realisasi Dana Alokasi
Khusus (DAK)

Tahun 2010-2016

Tabel 58. Data Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten dan Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	Nama Kabupaten dan Kota	Dana Alokasi Khusus							Jumlah Total D
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kab. Kulon Progo	41.614	48.337	45.380	52.894	47.077	53.806	212.674	501.78
2	Kab. Bantul	60.566	45.919	63.281	47.197	60.914	72.360	292.200	642.43
3	Kab. Gunungkidul	77.574	59.157	70.584	59.793	46.172	84.971	253.997	652.22
4	Kab. Sleman	69.847	42.650	52.237	50.823	48.673	57.470	240.746	562.44
5	Kota Yogyakarta	13.599	1.762	6.485	6.221	2.250	2.343	151.641	184.30

Ket: dalam jutaan rupiah

Data diperoleh dari laporan keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016

LAMPIRAN IX

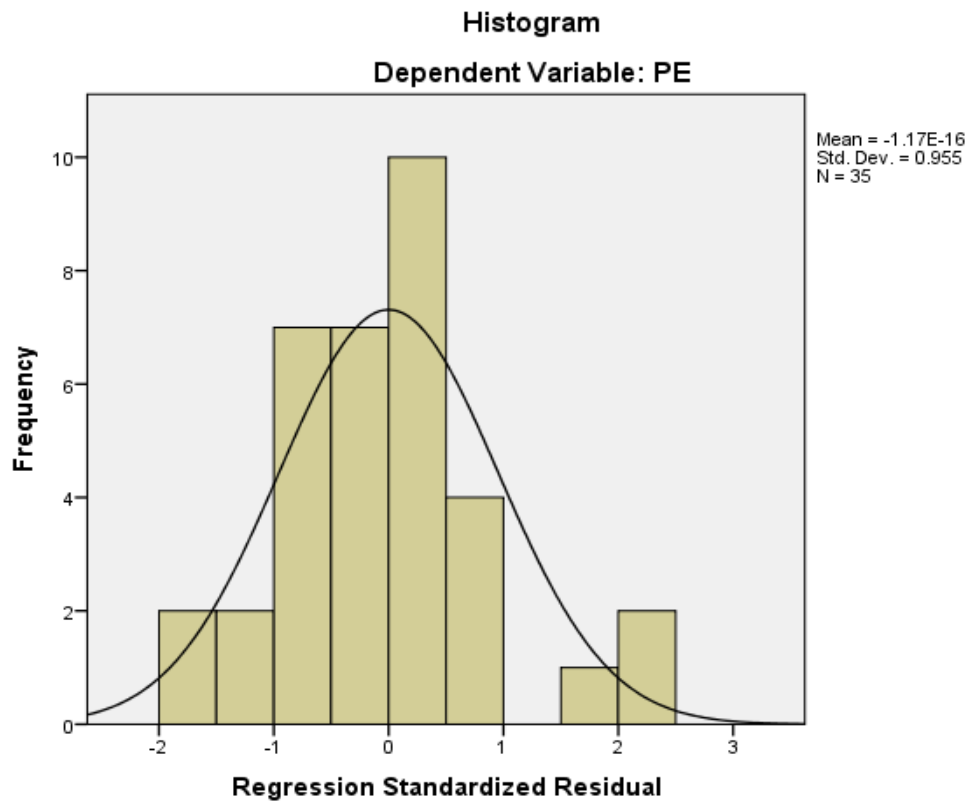
Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 20. Rangkuman Data Khusus

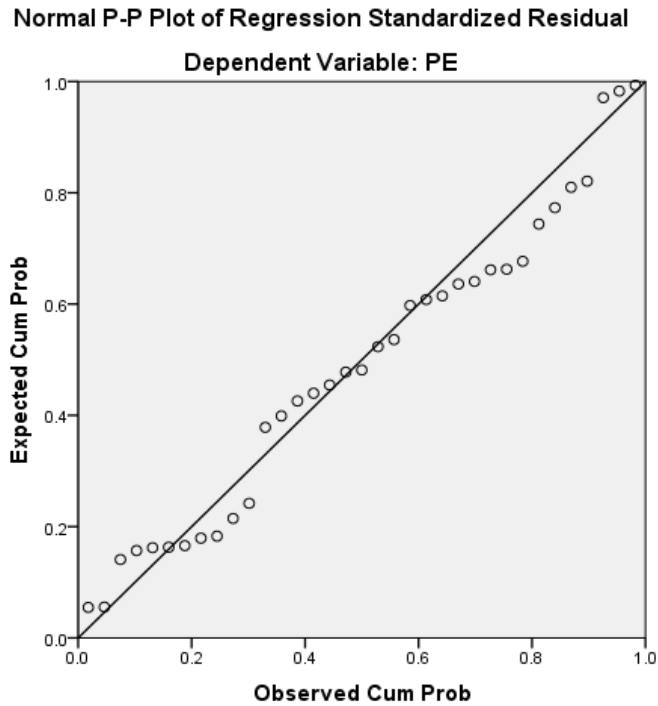
<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PE	35	3.06	5.89	4.9600	0.53940
PAD	35	42542031.00	717151176.00	259276708.6286	185815206.59631
DAU	35	395444062.00	1014310630.00	705291106.6857	183877144.42067
DAK	35	1761900.00	292199996.00	72663295.2571	71055001.05966
Valid N (listwise)	35				

Uji Normalitas

1. Histogram



2. P-Plot



3. Tabel 21. *One sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
<i>Normal</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
<i>Parameters^{a,b}</i>	<i>Std. Deviation</i>	36313359.71647036
<i>Most Extreme</i>	<i>Absolute</i>	0,115
<i>Differences</i>	<i>Positive</i>	0,115
	<i>Negative</i>	-0,073
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,683
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,739

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinieritas

Tabel 22. *Coefficient Correlations*

Coefficient Correlations^a

Model		DAK	PAD	DAU
1	Correlations			
	DAK	1,000	0,135	-0,512
	PAD	0,135	1,000	-0,547
	DAU	-0,512	-0,547	1,000
	Covariances			
	DAK	0,012	0,001	-0,003
	PAD	0,001	0,002	-0,001
	DAU	-0,003	-0,001	0,002

a. Dependent Variable: PE

Uji Autokorelasi

Tabel 23. *Model Summary*

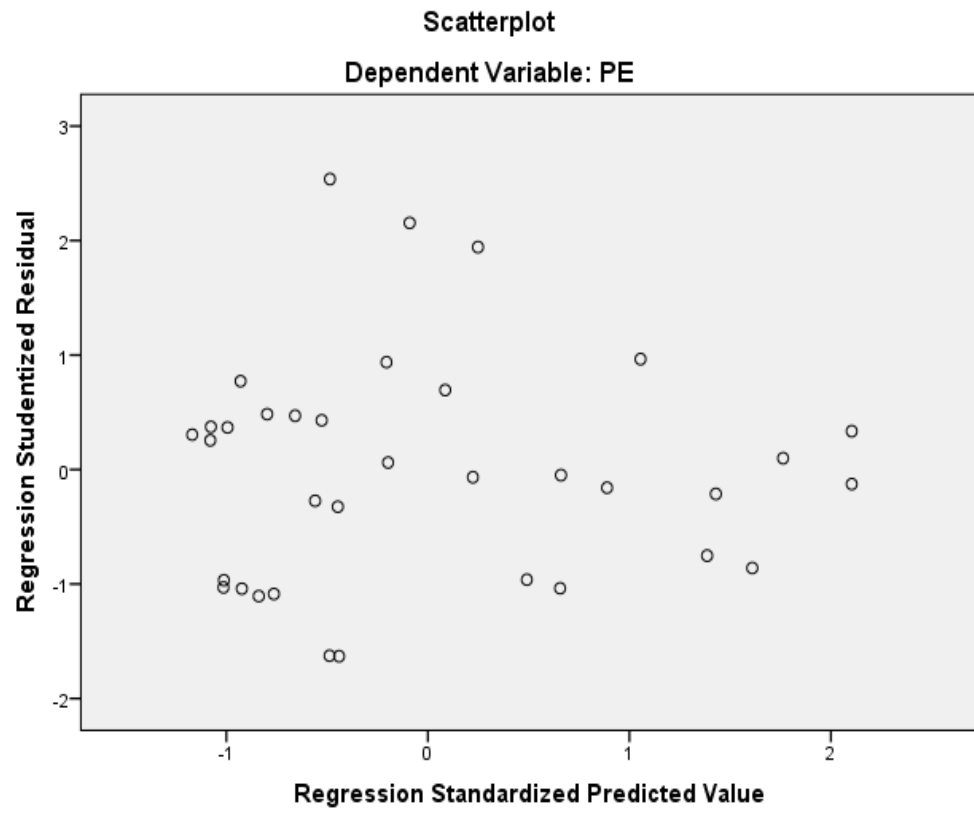
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,868 ^a	0,754	0,730	38029887.73385	1,397

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: PE

Uji Heteroskedastisitas



LAMPIRAN X

Hasil Analisis Regresi Linier

Regresi Linier Sederhana

1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 24. Model Summary Predictor PAD

<i>Model</i>	<i>r</i>	<i>r Square</i>	<i>Adjusted r Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,852 ^a	0,726	0,718	38847716.81807

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: PE

Tabel 25. Coefficients Predictor PAD

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	64669826.144	11381515.452		5.682	0,000
	PAD	0,336	0,036	0,852	9.362	0,000

a. Dependent Variable: PE

2. Dana Alokasi Umum

Tabel 26. Model Summary Predictor DAU

<i>Model</i>	<i>r</i>	<i>r Square</i>	<i>Adjusted r Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,381 ^a	0,145	0,119	68686703.54376

a. Predictors: (Constant), DAU

b. Dependent Variable: PE

Tabel 27. Coefficients Predictor DAU

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44871901.878	46650706.177		0,962	0,343
	DAU	0,151	0,064	0,381	2.364	0,024

a. Dependent Variable: PE

3. Dana Alokasi Khusus

Tabel 28. Model Summary Predictor DAK

Model Summary ^b				
Model	r	r Square	Adjusted r Square	Std. Error of the Estimate
1	0,015 ^a	0,000	-0,030	74267880.96241

a. Predictors: (Constant), DAK

b. Dependent Variable: PE

Tabel 39. Coefficients Predictor DAK

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	150546460.758	18089939.651		8.322	0,000
	DAK	0,016	0,179	0,015	0,088	0,930

a. Dependent Variable: PE

Regresi Linier Berganda

Tabel 30. Model Summary Predictor PAD, DAU, DAK

<i>Model</i>	<i>r</i>	<i>r Square</i>	<i>Adjusted r Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,868 ^a	0,754	0,730	38029887.733 85	1.397

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: PE

Tabel 31. Model Uji ANOVA Predictor PAD, DAU, DAK

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	137227324476047136.000	3	45742441492015712.000	31.628	.000 ^b
	Residual	44834443192524328.000	31	1446272361049171.800		
	Total	182061767668571456.000	34			

a. Dependent Variable: PE

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Tabel 32. Coefficients Predictor PAD, DAU, DAK

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	85360134.287	27866286.519		3.063	0,005
	PAD	0,360	0,043	0,913	8.404	0,000
	DAU	-0,024	0,050	-0,059	-0,473	0,640
	DAK	-0,142	0,109	-0,137	-1,297	0,204

a. Dependent Variable: PE

LAMPIRAN XI

Hasil Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif

Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif

Tabel 33. Jumlah Variabel X dan Y

Variabel	Jumlah
ΣX_1	9.076.729.000
ΣX_2	22.124.360.000
ΣX_3	2.543.214.000
ΣY	530.941.000
$\Sigma X_1.Y$	4.819.207.571.989.000
$\Sigma X_2.Y$	11.746.729.822.760.000
$\Sigma X_3.Y$	1.350.296.584.374.000

Ket: Dalam ribuan rupiah

Data sekunder diolah tahun 2017

A. Koefisien Regresi

$$Y = 85360134,287 + 0,360PAD - 0,024DAU - 0,142DAK$$

Diketahui:

$$\Sigma Y = 530.941.000$$

$$\alpha_1 = 0,360$$

$$\Sigma X_1 = 9.076.729.000$$

$$\Sigma X_1.Y = 4.819.207.571.989.000$$

$$\alpha_2 = -0,024$$

$$\Sigma X_2 = 22.124.360.000$$

$$\Sigma X_2.Y = 11.746.729.822.760.000$$

$$\alpha_3 = -0,142$$

$$\begin{aligned}
\Sigma X_3 &= 2.543.214.000 \\
\Sigma X_3 \cdot Y &= 1.350.296.584.374.000 \\
JK_{\text{reg}} &= (0,360) \cdot (4.819.207.571.989.000.000) - \\
&(0,024) \cdot (11.746.729.822.760.000.000) - (0,142) \cdot \\
&(1.350.296.584.374.000.000) \\
&= 1.734.914.725.916.040.000 - 28.192.151.574.624.000 - \\
&191.742.114.981.108.000 \\
&= 1.514.980.459.360.310.000 \\
r^2 &= 0,754
\end{aligned}$$

B. Sumbangan Relatif (SR%)

$$\begin{aligned}
X_1 = \text{SR}\% &= \frac{\alpha_1 \Sigma X_1 \cdot Y}{JK_{\text{reg}}} \times 100\% \\
&= \frac{1.734.914.725.916.040.000}{1.514.980.459.360.310.000} \times 100\% \\
&= 114,5\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X_2 = \text{SR}\% &= \frac{\alpha_2 \Sigma X_2 \cdot Y}{JK_{\text{reg}}} \times 100\% \\
&= \frac{-28.192.151.574.624.000}{1.514.980.459.360.310.000} \times 100\% \\
&= -1,9\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
X_3 = \text{SR}\% &= \frac{\alpha_3 \Sigma X_3 \cdot Y}{JK_{\text{reg}}} \times 100\% \\
&= \frac{-191.742.114.981.108.000}{1.514.980.459.360.310.000} \times 100\%
\end{aligned}$$

$$= -12,7\%$$

C. Sumbangan Efektif (SE%)

$$\begin{aligned} X_1 = SE\% &= SR\% \times r^2 \\ &= 114,5 \times 0,754 \\ &= 86,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_2 = SE\% &= SR\% \times r^2 \\ &= -1,9 \times 0,754 \\ &= -1,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_3 = SE\% &= SR\% \times r^2 \\ &= -12,7 \times 0,754 \\ &= -9,58\% \end{aligned}$$